

TONI NASUTION, M.Pd

INOVASI PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

INOVASI PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL



TONI NASUTION, M.Pd

**INOVASI PEMBELAJARAN
ILMU PENGETAHUAN SOSIAL**

Toni Nasution, M.Pd

INOVASI PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL



Cv. Puskra Mitra Jaya

Judul :

Inovasi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

Penulis :

Toni Nasution, M.Pd

Diterbitkan Oleh :

CV. Puskra Mitra Jaya

Alamat :

Percetakan Puskra, Jln. William Iskandar No. 2-K/ 22,
Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

e-mail :

cvpusdikramitrajaya@gmail.com

Kontak :

0823-6050-1584 (HP/WA)

Mhd. Fuad Zaini Siregar, M.Pd

Desain Sampul :

Parmata Hadamean Daulay, S.Sos /Puskra Team

ISBN :

978-623-5487-58-8

IKAPI :

No. 043/SUT/2020

Cetakan Pertama pada bulan Agustus tahun 2023

Copyright :**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit maupun penulis terkait. (Pasal 113 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014).



CV. Puskra Mitra Jaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt atas rahmat-Nya yang telah tercurah, sehingga penulis bisa menyelesaikan Buku Inovasi Pembelajaran IPS ini. Pada prinsipnya Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain manusia mengembangkan sistem-sistem dalam hidupnya melalui kemampuan akalnya seperti sistem mata pencaharian, sistem perlengkapan hidup dan lain-lain. Dalam kehidupannya sejak lahir manusia itu telah mengenal dan berhubungan dengan manusia lainnya. Seandainya manusia itu hidup sendiri, misalnya dalam sebuah ruangan tertutup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya, maka jelas jiwanya akan terganggu. Naluri manusia untuk selalu hidup dan berhubungan dengan orang lain disebut "*gregariousness*" dan oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial.

Adapun tujuan dari disusunnya buku ini agar membantu para akademisi pendidikan dan para mahasiswa dapat mengetahui berbagai literatur materi berbasis Ilmu Pengetahuan Sosial yang diharapkan menambah khasanah keilmuan, terlepas apapun jurusan yang mereka tempuh.

Tersusunnya buku ini tentu bukan dari usaha penulis seorang. Dukungan moral dan material dari berbagai pihak sangatlah membantu tersusunnya buku ini. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, rekan-rekan, dan pihak-pihak lainnya yang membantu secara moral dan material bagi tersusunnya buku ini. Buku yang tersusun sekian lama ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan agar buku ini bisa lebih baik nantinya.

Medan, Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
Pendahuluan	1
BAB II	
Inovasi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial	4
A. Inovasi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial	5
B. Kendala dan Hambatan Dalam Inovasi Proses Pembelajaran.....	14
C. Arah dan Inovasi Pembelajaran.....	16
BAB III	
Hakikat Pembelajaran IPS	19
A. Lahirnya Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).....	20
B. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (<i>Social Studies</i>).....	22
C. Istilah Ilmu-ilmu Sosial (<i>Social Sciences</i>) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (<i>Social Studies</i>).....	23
D. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial (<i>Social Studies</i>).....	25
E. Landasan Pendidikan IPS.....	27
BAB IV	
Sejarah Perkembangan Pendidikan IPS	31
A. Perkembangan IPS di Negara Lain	31
B. Perkembangan Pendidikan IPS dalam Sistem Pendidikan di Indonesia	36
BAB V	
IPS Dan Ilmu-Ilmu Sosial	45
A. Ilmu Sosiologi.....	48
B. Ilmu Antropologi	51
C. Ilmu Ekonomi.....	54
D. Ilmu Geografi.....	57
E. Ilmu Sejarah.....	59
F. Ilmu Politik.....	62
G. Ilmu Psikologi Sosial	67

BAB VI

Hubungan Antara Ilmu Sosial Dan IPS

(Sumber Dan Materi IPS)	70
A. Sumber dan Materi IPS.....	70
B. Hubungan Ilmu Sosial dengan IPS.....	71
C. Ilmu Sosial sebagai Sumber IPS.....	72
D. Masyarakat sebagai Sumber dan Materi IPS	74

BAB VII

Paradigma Pembelajaran IPS

A. IPS sebagai Transmisi Kewarganegaraan.....	82
B. IPS sebagai Ilmu Sosial	85
C. IPS sebagai Reflektif <i>Inquiry</i>	88
D. IPS sebagai Transformasi Sosial.....	91

BAB VIII

Pengembangan Materi Ajar IPS.....

A. Materi IPS	94
B. Pengorganisasi Materi IPS	102

BAB IX

Keterampilan-Keterampilan Dalam IPS.....

A. Pengembangan Keterampilan Membaca dalam Ilmu Pengetahuan Sosial.....	110
B. Pengembangan Keterampilan Partisipasi Sosial	114
C. Keterampilan Menggunakan Globe dan Peta	120

BAB X

Pendidikan Global.....

A. Materi Pendidikan Global.....	127
B. Materi Pendidikan Global.....	128
C. Kajian tentang Masalah-Masalah dan Isu-Isu Gobal.....	136
D. Kajian Sejarah Hubungan Antarbangsa dan Saling Ketergantungan.....	140

BAB XI

Pendidikan IPS Dan Pembangunan Karakter Bangsa

A. Nilai.....	144
B. Norma	149
C. Karakter	153

BAB XII

Metode Dan Media Pembelajaran IPS 160

- A. Pengertian Metode Pembelajaran.....160
- B. Macam-Macam Metode Pembelajaran IPS163
- C. Fungsi Penggunaan Metode Pembelajaran168
- D. Pengertian Media Pembelajaran IPS.....169
- E. Macam-Macam Media Pembelajaran IPS169
- F. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran.....170

BAB XII

Pendidikan IPS Dalam Kurikulum 2013 172

- A. Konsep Kurikulum 2013.....172
- B. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial173
- C. Pendekatan Saintifik pada Kurikulum 2013.....177
- D. Model-Model Pembelajaran IPS dalam Kurikulum 2013179

BAB XII

Permasalahan IPS Di Sekolah 185

- A. Permasalahan Kurikulum IPS di SD185
- B. Permasalahan Kurikulum IPS di SMP.....186
- C. Permasalahan Kurikulum IPS di SMA187

DAFTAR PUSTAKA..... 189

TENTANG PENULIS..... 196



BAB I

Pendahuluan

Pendidikan sejatinya menjadi kekuatan dalam maju dan berkembangnya Pendidikan, sehingga dalam dunia Pendidikan ada banyak proses yang dilalui dan perlu dipersiapkan demi sukses dan tercapainya tujuan Pendidikan itu sendiri. Untuk mencapai keberhasilan tersebut maka proses pembelajaran dalam Pendidikan dipandang perlu untuk dilakukan inovasi pembelajaran. Menurut UNESCO, kecenderungan pendidikan di abad 21 memuat empat pilar utama, yaitu: (1). *Learning to know*, (2) *Learning to do*, (3). *Learning to live together*, (4). *Learning to be*. Hal ini sejalan dengan tuntutan kurikulum yang harus dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip: (1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, (2) beragam dan terpadu, (3) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (4) relevan dengan kebutuhan kehidupan (5) menyeluruh dan berkesinambungan (6) belajar sepanjang hayat (7) seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Sejalan dengan pilar Pendidikan tersebut maka Inovasi pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial menjadi sangat penting, karena berbicara inovasi berarti adanya pembaharuan, pengembangan

penemuan dan pengkombinasian penyempurnaan proses pembelajaran agar proses pembelajaran yang dilakukan dapat lebih efektif dan mencapai hasil yang diharapkan. Ilmu Pengetahuan Sosial pada hakikat memiliki tanggungjawab penting terhadap pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik. Sehingga inovasi pembelajaran sejatinya mampu di pusatkan pada pengembangan-pengembangan pada komponen tersebut. Pada prinsipnya Pendidikan IPS sangat dekat dengan masyarakat karena sangat implementatif dan berguna dalam kehidupan bermasyarakat.

Inovasi pembelajaran IPS berarti adanya perubahan dan pembaharuan yang dilakukan dan proses pembelajaran, yang mana kegiatan pembelajaran di dalamnya terdapat proses yang harus dirancang, dikelola, dikembangkan secara dinamis, kreatif dengan pendekatan multi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif bagi peserta didik. Pada dasarnya esensi kajian pendidikan IPS apabila diambil kesimpulan dari tujuan Pendidikan IPS pada jenjang pendidikan Maka buku ini memberikan sejumlah nilai terhadap ketercapaian tujuan pendidikan nasional, *Pertama*, memberikan bekal pengetahuan untuk menambah khasanah keilmuan tentang manusia dan kehidupan sosial yang mana manusia hidup dalam kehidupan beragama serta lingkungannya sebagai insan mandiri, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Kedua*, membina kesadaran, keyakinan dan sikap akan pentingnya hidup bermasyarakat dengan penuh kebersamaan, bertanggungjawab dan kemanusiaan. *Ketiga*, membina keterampilan hidup bermasyarakat dalam negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila. *Keempat*, menunjang terpenuhinya bekal kemampuan dasar peserta didik dalam mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan anggota manusia. *Kelima*, membina perbekalan dan kesiapan untuk belajar lebih lanjut atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Tujuan inovasi pembelajaran IPS bertujuan melakukan pembaharuan dan pengembangan proses pembelajaran peserta didik menjadi warga negara yang baik, warga masyarakat yang konstruktif dan produktif yaitu warga negara yang memahami dirinya sendiri dan masyarakatnya, mampu merasa sebagai warga negara, berpikir sebagai warga negara, bertindak sebagai warga negara, dan jika mungkin juga

mampu hidup sebagaimana layaknya warga negara. Sehingga dalam pembelajaran IPS diharapkan adanya inovasi yang berkelanjutan agar mencapai hasil yang lebih baik. Melakukan inovasi dalam pembelajaran berarti melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik.

Banyaknya temuan keluhan terkait Pendidikan IPS tidak sedikit ditemukan, antara lain membosankan, tidak menantang berpikir, menambah beban belajar tidak ada manfaatnya, Pendidikan IPS hanya untuk mereka yang kurang cerdas, materi pelajaran tidak berkenaan dengan kehidupan sehari-hari dan pelajaran yang monoton dimana peserta didik lebih banyak mendengar dan mencatat. Artinya bahwa keluhan-keluhan tersebut hamper muncul disetiap waktu, meskipun perubahan selalu ada, akan tetapi perubahan tersebut belum mampu merubah keluhan-keluhan tersebut. Oleh sebab itu dengan adanya Keluhan-keluhan tersebut menuntut adanya inovasi dalam pembelajaran IPS itu sendiri.

Adanya inovasi pembelajaran diharapkan mampu menjadi salah satu upaya untuk mengubah kebiasaan pembelajaran secara tradisional, seperti mendengar, mencatat, berdiskusi, menjawab pertanyaan guru yang terpaku pada kertas di mejanya menjadi pembelajaran yang lebih terpadu dan kreatif.



BAB II

Inovasi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

Berbicara inovasi bahwa akan selalu ada yang berubah dari segala aspek sistem dalam sebuah pembelajaran. Sehingga akan banyak persepsi seperti Kesenjangan antara kualitas pendidikan dalam kenyataan empirik dengan tuntutan ideal, kurikulum, kehidupan praktis dan perkembangan masyarakat untuk dilakukan terus menerus inovasi pendidikan. Inovasi adalah merupakan upaya strategis dan keharusan untuk dilakukan dalam menjawab tantangan pendidikan, dalam membina kualitas manusia Indonesia yang memiliki kemampuan kompetitif.

Sifat konservatif dan masalitas pendidikan dihadapkan pada derap perubahan masyarakat yang dipacu dengan IPTEK, dapat diimbangi melalui inovasi pembelajaran, yang dibudayakan dengan dukungan kebijakan ilmu. Pendidikan dan keguruan, dalam wujud teori dan model pembelajaran dengan dukungan kebijakan nasional, dijadikan sebagai gerakan budaya pendidikan. paradigmatic perlu menempatkan konsep inovasi pembelajaran. Tidak berarti mengganti secara total semua sistem dan pengalaman dalam pendidikan, akan tetapi itu bersifat peningkatan, penyempurnaan dan pembaharuan.

Inovasi dalam proses pembelajaran yang bertentangan dengan prinsip tersebut, akan cepat ketinggalan dan bahkan akan menjadi penghambat proses inovasi tersebut.

Bahasan ini mengetengahkan beberapa isu hipotesis hasil analisis empirik tentang dimensi tantangan, peluang, kendala untuk membantu merumuskan masalah, serta arah bagi pelaksanaan inovasi pembelajaran. Disajikan sebagai bahan kajian dalam forum konvensi untuk memperoleh klasifikasi dan validasi teoritik maupun empirik semestinya.

A. Inovasi Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial

1. Permasalahan

Sumber daya manusia dalam pendidikan dan sumber dana pendidikan semakin menunjukkan keterbatasan, baik kualitas maupun kuantitas. Di lain pihak, kebutuhan dan tuntutan akan pendidikan yang berkualitas semakin tidak

terbatas. Terlebih pada saat pendidikan dihadapkan pada tugas dalam mempersiapkan SDM untuk memenuhi kebutuhan percepatan perkembangan IPTEK yang juga tidak terbatas dan semakin sulit diramalkan. Dalam tantangan mempersiapkan kualitas manusia seutuhnya dalam rangka menopang pembangunan nasional, pendidikan dihadapkan pada sejumlah masalah, baik mutu maupun relevansi. Sementara itu, pendekatan demokratisasi pendidikan yang antara lain dalam konsep pendidikan masal "*for all*" dalam negara sedang berkembang, sering terkesan dalam bentuk mobilitas masal pendidikan, dengan orientasi kuantitas partisipasi pendidikan lebih menonjol pada proses dan mutu pendidikan.

Terlalu kuat dan lama onientasi pada pendekatan masal akan mengakibatkan peran, baik para pengambil kebijakan maupun pengembangan dan pelaksanaan pendidikan, cenderung mengabaikan masalah kualitas pembelajaran. Demikian juga, bila inovasi dalam manajemen dan administrasi pendidikan lebih menonjol pada inovasi pembelajaran. Implikasi-nya kerap muncul gugatan tantangan pembaharuan pendidikan. Kondisi seperti itu akan terasa makin kuat pada masyarakat berkembang, seperti halnya masyarakat kita yang sedang membangun. Hal mi disebabkan transformasi melalui

pembangunan nasional yang menuju pada masyarakat industri modern, sering ditandai dengan perubahan orientasi nilai sosial budaya dan pendidikan.

Pembangunan sebagai bagian dari perubahan dan transformasi sosial budaya, ternyata melahirkan pula ekses-ekses yang memberikan perhatian serius, antara lain melemahnya nilai-nilai lama yang telah memperkuat struktur masyarakat. Sementara itu, nilai-nilai baru yang dibutuhkan belum muncul, sehingga akan menimbulkan kesenjangan budaya antara format perubahan sosial budaya dengan nilai-nilai baru yang relevan. Disinilah peran strategis pembaruan pembelajaran dalam memenuhi tantangan pendidikan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Dampak kelemahan tersebut, peningkatan mutu pendidikan sangat lama prosesnya, karena tidak hanya menyangkut dukungan teoritik, juga dihadapkan pada masalah budaya pendidikan kita dan sisi lain, bukan saja pendidikan perlu disentuh pembaharuan dalam memperkuat SDM, akan tetapi dalam mengantisipasi dampak negatif dan proses perubahan sosial budaya itu sendiri.

Artinya bahwa, pendidikan sangat kuat pengaruhnya terhadap perubahan sosial budaya. Di lain pihak, pendidikan amat luas, mencakup berbagai unsur yang secara sistematis mempengaruhi kualitas pendidikan, namun kiranya tepat apabila unsur pembelajaran sangat strategis sebagai pusat kajian dalam kerangka inovasi pendidikan. Hal ini disebabkan secara empirik, memang merupakan titik lemah pendidikan kita dewasa ini, dan secara teoritik diakui para pakar, bahwa pembelajaran merupakan inti pendidikan, sehingga budaya pembelajaran inilah perlu dikembangkan.

Inovasi dalam pembelajaran sangat rendah, hal ini diungkap dalam penelitian (Dikti; 1993), bahwa secara keseluruhan penelitian yang dilakukan oleh LPTK, tidak mencerminkan adanya inovasi dan pembaharuan secara konseptual dalam proses pembelajaran. Bahkan terjadi kemandegan dalam perkembangan maupun penerapan hasil inovatif dalam bidang pendidikan, yang mengakibatkan terjadinya kedangkalan (Konperensi Nasional Pendidikan III: 1996).

2. Lingkup Masalah dan Paradigma dalam Inovasi Proses Pembelajaran

Fokus masalah yang tepat untuk dikaji dalam rangkaian inovasi pembelajaran dalam konteks memperkuat mutu pendidikan nasional dewasa ini, berkisar pada bagaimana arah pelaksanaan inovasi pembelajaran tersebut. Masalah ini mencakup aspek yang menjadi tantangan, peluang kekuatan, kelemahan masalah serta alternatif bagi pelaksanaan inovasi dalam proses pembelajaran. selain itu, menyangkut kajian tentang mengapa terjadi kelangkaan inovasi dalam proses pembelajaran, bagaimana kemungkinan produktivitas dan strategi inovasi tertentu, bagaimana tentang arah orientasi inovasi pendidikan serta bagaimana kebijakan inovasi dalam proses pembelajaran.

Strategi untuk membahas masalah di atas didasarkan atas paradigma, bahwa terdapat dua tarikan yang mempengaruhi tuntutan dan tantangan pendidikan. Pertama, pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk berperan memperkuat sistem nilai, dalam mempertinggi kualitas keimanan dan ketaqwaan. Kedua, pendidikan dihadapkan pada tuntutan paradigmatik untuk memerankan pendidikan dalam penguasaan ilmu dan teknologi. Tantangan ini muncul dan menuntut untuk dihadapi secara serentak, dan menuntut jawaban strategis dengan mengintegrasikan kebijakan dan kebudayaan, dalam kerangka peningkatan kualitas manusia Indonesia untuk menyongsong tahun 2020 melalui peningkatan mutu pendidikan. Tantangan ini kaitannya dengan inovasi proses pembelajaran, tampak jelas menuntut konseptual tentang arah inovasi dalam proses pembelajaran, agar peserta didik memiliki kemampuan untuk memberdayakan potensi keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa sebagai kekuatan spiritual dan bagaimana pembelajaran secara efektif dapat memberdayakan potensi dalam penguasaan IPTEK. Untuk itu, diperlukan kokohnya landasan teoritik yang memiliki kekuatan konseptual dengan masalah nyata pendidikan kita, dan bagaimana rekayasa model pembelajaran.

Tantangan ini muncul, ditandai dengan lemahnya landasan dan acuan teoritik dan langkanya model pembelajaran, yang memiliki validitas empirik dalam situs sosial budaya bangsa. Diduga kelemahan tersebut ada kaitannya dengan lemahnya penelitian pendidikan dalam

pembelajaran, serta belum berperannya para pendidik, sebagai pelaku utama pendidikan rnehmerankan diri sebagai peneliti dan pengembangan pembelajaran. Kedua faktor ini diasumsikan memperlemah inovasi pembelajaran dalam pendidikan kita selama ini.

3. Tantangan Bagi Inovasi Proses Pembelajaran

Rendahnya pembelajaran selama ini diantisipasi cenderung menurun, bila dihadapkan perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat. Hal ini berkenaan dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek yang sangat pesat. Sementara itu, pendidikan terjebak dan terstruktur oleh gejala rutinitas. Keadaan inilah yang meyebabkan semakin kuatnya kesenjangan antara mutu pendidikan dengan kemajuan teknologi. Tumpuan terhadap kualitas pembelajaran cenderung menguat dalam mempersiapkan sumber daya manusia, sementara itu pendidikan dihadapkan pada dua dimensi yang sekaligus menuntut untuk ditumbuh kembangkan dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kekuatan untuk memberdayakan potensinya yang optimal, untuk penguasaan IPTEK dalam orientasi mencerdaskan kehidupan bangsa atas landasan iman dan taqwa.

Memasuki era globalisasi tahun 2020 bangsa Indonesia, era kompetitif secara global masuk dalam percaturan bangsa lain. Kondisi ini ditandai dengan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Jenis dan persyaratan pekerjaan bertambah semakin tinggi dan peluang memasuki pekerjaan semakin kompetitif. Demikian pula pendidikan formal persekolahan akan semakin ketinggalan. Ketidakpastian perkembangan masyarakat yang dipacu oleh IPTEK mempengaruhi terhadap tuntutan kualitas sumber daya manusia. Inilah yang menjadi tantangan serius perlunya inovasi dalam proses pembelajaran IPS.

Berbicara konseptual tentang SDM, IMTAQ, dan IPTEK, pendidikan merupakan inti persoalan. Dengan demikian, lemahnya kualitas pendidikan akan secara langsung memperlemah kondisi SDM, baik dalam pemikiran IMTAQ maupun dalam penguasaan IPTEK. Berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan, melahirkan tantangan baru bagi dunia pendidikan. selain itu, berkembangnya teknologi informasi mempengaruhi terhadap perolehan peserta didik tentang informasi, tidak terbatas pada guru

dan buku sebagai sumber informasi yang tersedia. Akan tetapi, sudah meluas dengan mengakses pada media masa seperti jaringan internet sebagai sumber informasi modern.

Di sisi lain media masa informasi seperti TV, sangat besar pengaruhnya terhadap hasil pendidikan, namun demikian belum terakses oleh para guru, baik dalam proses pengembangan program maupun proses pembelajarannya. Kondisi merupakan tantangan inovasi proses pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan, supaya dapat mengimbangi tuntutan aktual futuristik pendidikan IPS. Secara umum, pengembangan metodologi proses pembelajaran belum terakses pada sumber informasi tersebut, namun untuk masa mendatang kiranya tidak dapat dihindari untuk dijadikan isu sentral dan arah pengembangan model pembelajaran, terutama dalam menyongsong tahun 2020. Kondisi ini mengisyaratkan sebagai tantangan bagi inovasi dalam pembelajarannya. Salah satu prinsip antara lain perlunya pergeseran dan peran guru sebagai fasilitator dan partner belajar peserta didik, dengan memerankan siswa yang paling utama dalam proses pembelajarannya.

Kesenjangan antara kualitas pendidikan dalam kenyataan empirik, dengan tuntutan ideal kurikulum kehidupan praktis dan perkembangan masyarakat, menuntut untuk dilakukan terus menerus inovasi pendidikan IPS. Inovasi merupakan kebutuhan dan keharusan yang dilakukan, agar kesenjangan tadi dapat dikendalikan. Selain itu, perlu disadari bahwa sistem pendidikan cenderung akan selalu ketinggalan oleh perkembangan masyarakat. Disatu pihak masyarakat bersifat dinamis, sedangkan di lain pihak pendidikan cenderung bersifat konservat terutama pada masyarakat yang sedang berkembang.

Inovasi pembelajaran IPS pada hakekatnya, adalah upaya untuk memenuhi peningkatan mutu proses pendidikan yang dilakukan terus menerus, untuk memenuhi perkembangan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. Oleh karena itu, inovasi tidak berarti peningkatan penyempurnaan dan pembaharuan inovasi dalam proses pembelajaran yang bertentangan dengan prinsip tersebut yang justru akan cepat ketinggalan dan bahkan akan menjadi penghambat, perubahan atau lambatnya proses inovasi tersebut. Dengan demikian

inovasi dalam pembelajaran IPS akan efektif dilakukan, manakala ditunjuk oleh hasil evaluasi dan penelitian dalam bidang pembelajaran IPS. Lemahnya dan langkanya penelitian dalam bidang ini menyebabkan akan sulit inovasi dilakukan. Jika demikian, akan mengakibatkan rendahnya mutu, relevan, efisiensi pendidikan, bahkan akan mempengaruhi kesempatan dan pemerataan pendidikan.

Gejala yang muncul dalam masyarakat kita sekarang, yang sangat memprihatinkan berbagai kalangan, antara lain melemahnya moral, penyalahgunaan obat terlarang, dan kenakalan remaja, sadisme dan perlakuan penyimpangan seksual, penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan. Disamping itu pula, muncul gejala melemahnya solidaritas sosial dan meningkatnya sikap individualistik, sebagai gejala yang dapat menimbulkan masalah sosial.

Kenakalan remaja yang sedang mengarah pada tindakan kriminal dalam usia sekolah kerap terjadi, perkelahian antara pelajar bahkan di kalangan mahasiswa. Kondisi ini merupakan tantangan bagi dunia pendidikan dan perlu dijadikan dasar pikiran bagi perlunya inovasi dalam pembelajaran IPS. Kondisi sosiologis ini menuntut motivasi pembelajaran IPS tidak didasarkan hanya pada dimensi psikologis semata, akan tetapi harus mengakses pada dimensi sosial budaya. Kualitas pembelajaran pada umumnya sangat rendah seperti terungkap dalam beberapa penelitian. Seperti halnya dalam pelajaran pendidikan ilmu pengetahuan sosial di sekolah menengah atas (Suwarma AM: 1991), pada pendidikan dasar (Sanusi dkk: 1993). Penelitian lain menunjukkan, bahwa lemahnya proses pembelajaran di tingkat persekolahan, ada kaitannya pula dengan pola belajar guru yang bersangkutan pada saat belajar di LPTK (Ranidar: 1996).

4. Analisis Kelemahan Pembelajaran

Analisis mengenai kelemahan pembelajaran yang secara umum dilaksanakan di lapangan teridentifikasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Proses pembelajaran kurang ditunjang dengan pengembangan dan penggunaan media dan alat pembelajaran.
- 2) Proses pembelajaran lebih menekankan pada pengembangan aspek kognitif dan pada afektif dan psikomotor.
- 3) Proses pembelajaran kurang menyentuh aspek nilai sosial dan keterampilan sosial.

- 4) Proses pembelajaran lebih menekankan pada pencurahan isi buku dan pada proses penalaran isi buku.
- 5) Proses pembelajaran lebih menempatkan siswa sebagai penenerima informasi dalam soal belajar satu arah, dan melibatkan siswa dalam proses berpikir.
- 6) Proses pembelajaran lebih menempatkan guru sebagai sumber informasi yang dominan, di samping terbatasnya penggunaan sumber daya belajar lainnya.
- 7) Proses pembelajaran lebih menempatkan guru sebagai sumber informasi, seperti yang terdapat di dalam buku, dan kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan nyata.
- 8) Proses pembelajaran belum banyak mengakses pada penguatan sistem nilai keimanan dan ketaqwaan.

5. Faktor Penentu Proses Pembelajaran

Masalah yang mengedepankan dalam proses pembelajaran antara lain apakah faktor penyebab lemahnya proses pembelajaran. Ternyata secara teoritik maupun empirik proses pembelajaran, banyak faktor yang mempengaruhi baik dalam pengembangan maupun pelaksanaannya. Antara lain tujuan materi, dukungan fasilitas, kondisi siswa dan guru.

6. Peluang Inovasi Proses Pembelajaran

Identifikasi terhadap peluang dan kekuatan yang ada muncul secara empirik, dan secara teoritik perlu dilakukan untuk menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan inovasi pembelajaran. Berbagai penelitian seperti disimpulkan (Depdikbud: 1994), menunjukkan bahwa tingkat pencapaian peserta didik berbeda menurut faktor-faktor sosio geografi, karena alasan ini evaluasi saja tidak cukup, dan perlu dilengkapi akseptabilitas dan ekuitas. Prinsip perbedaan individual mestinya mendapatkan perhatian dalam proses pembelajaran, kiranya faktor layanan individual ini cenderung terabaikan dalam sistem klasikal. Untuk itu, model-model pembelajaran kelompok "*cooperative learning*" perlu dikembangkan, yang diduga di lapangan tidak banyak digunakan sebagai model pembelajaran, padahal model ini banyak variasinya, dan bukan saja tuntutan empirik, tetapi juga memiliki relevansi sosio kultural dengan pakar budaya bangsa kita yang memiliki nilai ideal budaya gotong royong dan kekeluargaan.

Di negara Barat, model ini diunggulkan sebagai pendekatan dan model pembelajaran yang memiliki efektivitas tinggi dalam memperkuat proses dan hasil pembelajaran. Secara teoritik, model ini memiliki kekuatan sebagai peluang bagi pelaksanaan inovasi dalam pembelajaran. Berbagai model telah dikembangkan dan berbagai penelitian telah dilakukan untuk semua mata pelajaran dalam kurikulum sekolah dan berbagai latar belakang peserta didik. Salah satu keunggulan dalam model belajar ini dapat mengembangkan kemampuan interpendensi, yang dinyatakan pula sebagai dasar filosofi dari model ini (Robert J. Calomb: 1994). Kemandirian dapat dikembangkan dalam model pembelajaran kelompok ini, begitu pula perbedaan dan layanan perbedaan individual dapat dilakukan. Kadar keterlibatan siswa secara utuh dalam pembelajaran sangat tinggi, begitu pula kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri sangat tinggi.

"Model *group investigation*" telah dikembangkan oleh Joice and Weil (1980), model belajar "*learning together*" (Roger Johnson: 1987), model "*student te achievement devition*", (Slavin: 1978-1986). Keunggulan lain yang ditemukan dalam penelitian tentang "*cooperative learning*" ini antara lain, bahwa model ini dapat mengembangkan kemampuan akademik yang cukup tinggi (58%) (Sharon and Schar: 1998). Slavin and Dickle (1981) untuk siswa Afrika dan Amerika menemukan hal yang sama. Sedangkan dalam pelajaran IPS Geografi ditemukan dalam penelitian yang ditemukan Allen (1984). Keunggulan lain adalah dapat mengembangkan "*intergroup relation*" untuk *model jigsaw*, "*learning together*" dan "*group investigation*" ditemukan dalam studi Slavin (1985). Pada pembelajaran IPS (*social student*), model pembelajaran ini memiliki keunggulan dalam menyelaraskan antara dimensi sosial dan dimensi studi (pembelajaran), seperti kita maklumi bahwa pembelajaran ini sering dianggap pelajaran kurang menarik dan membosankan (Nu'man Sumantri: 1987), bahkan dinilai tidak efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan nilai (Suwarma: 1991).

Dapat kiranya diasumsikan, bahwa pembelajaran dapat dilakukan dalam kelompok belajar bersama, yang menekankan belajar pada kelompok. Selama ini dirasakan masih belum secara sengaja dikembangkan dalam proses pembelajaran, oleh karena itu merupakan

tantangan dan tuntutan terhadap inovasi pembelajaran. Jika dilakukan, akan dapat mengatasi kelemahan pembelajaran yang selama ini dilakukan di lapangan. Namun demikian, keunggulan yang sudah ditemukan dalam berbagai penelitian dan studi pengembangan pembelajaran di negara lain, perlu mendapatkan validitas dalam situs masalah sosial budaya pendidikan di negara kita. Untuk itu, perlu sekali penelitian dilakukan untuk memberikan masukan bagi inovasi pembelajaran, yang akan dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan untuk mempersiapkan kualitas SDM dalam menyongsong 2020.

Di bawah ini, dirumuskan beberapa peluang dan kekuatan yang bersifat hipotesis, untuk mengidentifikasi faktor peluang dan kekuatan bagi pelaksanaan inovasi proses pembelajaran dalam sistem pendidikan nasional kita dewasa ini.

- 1) Lembaga LPTK dengan berbagai sumber daya yang ada memiliki kemampuan profesional, untuk mengembangkan teori dan model pembelajaran untuk kepentingan ragam mata pelajaran dan tingkat pendidikan.
- 2) Lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan "*inservice training*" keguruan dan pendidikan, sudah melembaga dan dapat ditingkatkan peranannya dalam pelatihan model pembelajaran.
- 3) Kebijakan, sistem manajemen pendidikan, dan kemampuan birokrasi pendidikan memungkinkan memperkuat daya dukung pembelajaran.
- 4) Daya dukung masyarakat dapat ditransformasikan menjadi daya dukung pembelajaran, sejalan dengan semakin menguatnya aspirasi dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.
- 5) Model pembelajaran dengan pendekatan "*cooperafive learning*" memiliki validitas sosial budaya serta relevansi, dengan masalah pembelajaran dalam sistem pendidikan dewasa ini.
- 6) Peran guru dapat ditransformasikan ke arah sebagai pengembang kurikulum dengan memberikan pencildikan tambahan dan pelatihan untuk dapat bertindak sebagai peneliti, pengembang dan pelaku inovasi pembelajaran.

B. Kendala dan Hambatan Dalam Inovasi Proses Pembelajaran

Pertanyaan yang muncul untuk memahami arah bagi pelaksanaan inovasi pembelajaran dalam bidang pendidikan, memungkinkan diidentifikasikannya berbagai faktor yang memungkinkan dapat muncul sebagai kendala dan hambatan bagi inovasi pembelajaran. Dan studi evaluasi tim Dikmenum (1995), diperoleh jenis dan tingkat kesulitan yang dirasakan oleh siswa dalam proses pembelajaran selama diantaranya menghafal, mendengar penjelasan guru, menjawab pertanyaan, materi terlalu banyak.

Hasil evaluasi nasional di atas menunjukkan, bahwa menghafal merupakan keuletan yang banyak dialami oleh para siswa dan mendengarkan penjelasan guru. Kedua kesulitan belajar tersebut justru merupakan proses pembelajaran yang sangat terendah dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan nilai. Kondisi ini merupakan kelemahan umum dan model pembelajaran selama ini, yang banyak dilakukan di lapangan dalam implementasi kurikulum (Suwarma AM: 1991). Dan penelitian ini, yang menarik adalah “menjawab pertanyaan tidak merupakan kesulitan utama yang dirasakan oleh peserta didik”. Temuan ini memberikan isyarat sebagai kekuatan untuk mengembangkan inovasi pembelajaran dengan mengembangkan model diskusi dan model belajar kelompok lainnya.

Perlu dikaji lebih lanjut, dalam mengidentifikasi hambatan bagi kemungkinan inovasi pembelajaran, antara lain apakah kebiasaan selama ini yang dilakukan oleh para guru dan siswa menjadi hambatan, bagaimana kemungkinan hambatan orientasi dalam pengembangan model pembelajaran, bagaimana kemungkinan guru diperankan sebagai aktor inovator, bagaimana dukungan hasil penelitian dan kebijakan nasional, relevansi pendidikan dan tuntutan perubahan masyarakat dan lain-lain.

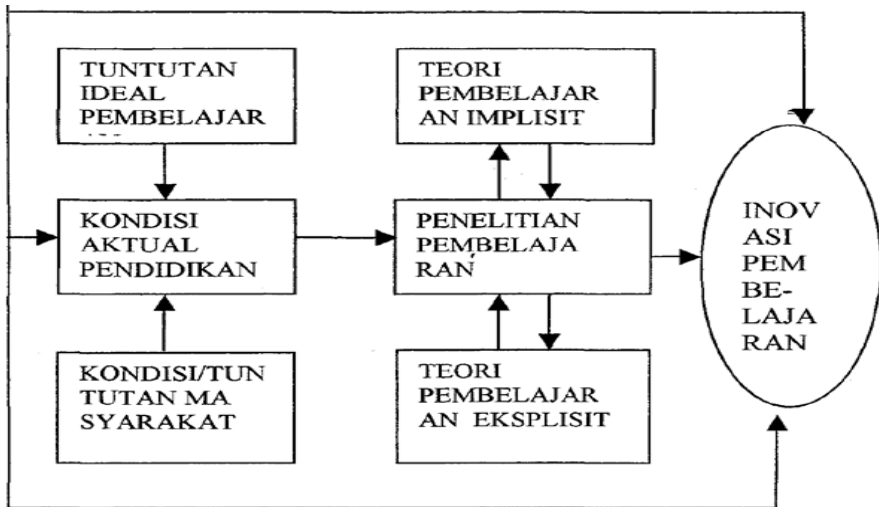
Berikut ini secara hipotesis dirumuskan beberapa faktor yang diperkirakan akan muncul sebagai kendala dalam inovasi pembelajaran tersebut, untuk disajikan bahan diskusi:

- 1) Kebiasaan faktor yang sangat kuat dalam memunculkan budaya rutinitas, yang dapat menghambat munculnya dorongan bagi inovasi pembelajaran.
- 2) Orientasi yang terlalu kuat dalam memunculkan pencapaian

- partisipasi pendidikan yang menghambat bagi inovator pembelajaran.
- 3) Kondisi guru lebih kuat sebagai pelaksana kurikulum, dan pada sebagai pengembang kurikulum yang diperkuat dengan pendekatan birokrasi, akan dapat menghambat inovasi pembelajaran
 - 4) Langkanya penelitian pendidikan dalam bidang pembelajaran, yang diperkuat belum berperannya pendidikan sebagai sumber informasi dan penelitian pendidikan, dapat menjadi hambatan atau kendala bagi inovasi pendidikan.
 - 5) Kebijakan nasional dalam bidang pendidikan belum secara langsung banyak menyentuh secara langsung bidang pembelajaran, diperkuat dengan kurangnya memberikan dukungan otonomi bagi guru dan sekolah, dapat mengakibatkan hambatan bagi inovasi pembelajaran.
 - 6) Kesenjangan antara proses pembelajaran dengan tuntutan perubahan dalam masyarakat yang sangat lebar, ditambah dengan terbatasnya sumber daya pendidikan, dapat menjadi hambatan dan kendala bagi inovasi pembelajaran.
 - 7) Orientasi yang kuat terhadap penguasaan materi pendidikan, yang secara dikhotomik mengabaikan penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, dapat menjadi hambatan atau kendala dalam inovasi pembelajaran.
 - 8) Etos kerja dan tingkat kesejahteraan pendidik, dapat muncul sebagai hambatan eksternal dalam upaya inovasi pembelajaran, seperti halnya yang sedang diperjuangkan saat ini oleh mereka.

C. Arah dan Inovasi Pembelajaran

Seperti telah dikemukakan, kajian teontik dan empirik memberikan indikator tentang perlunya inovasi pembelajaran, sekaligus memberikan isyarat bagi arah pelaksanaan inovasi tersebut.



Gambar 1.

Model Strategi Inovasi Pembelajaran

Disamping dukungan teori pembelajaran, jugi hendaknya menempatkan guru sebagai inisiator, inovator, dengan menjadikan pengalaman empirik sebagai modal pengembangan model inovasi. Berikut ini model alternatif arah inovasi seperti yang dilakukan pada bagan di atas. Untuk inti dan model ini, perlu dirumuskan terlebih dahulu profil kesenjangan antara tuntutan ideal kurikulum, kondisi aktual pembelajaran dan tuntutan masyarakat. Profil ini dapat diangkat melalui pendidikan atau studi evaluasi, kemudian dengan dukungan teori implisit dan eksplisit dapat dirancang model inovasi pembelajaran. Hasil studi selama ini, dilakukan atas dasar rumusan hipotesis dan kajian teoritik, empirik, tantangan, peluang, kendala seperti masalah dalam pembelajaran yang dikemukakan. Beberapa prinsip bagi arah inovasi pembelajaran untuk kondisi pendidikan, dalam rangka upaya strategis pembinaan sumber daya manusia Indonesia, adalah sebagai berikut:

- 1) Inovasi pembelajaran harus bertumpu pada upaya pembelajaran

- peserta didik secara penuh, baik intelektual maupun emosional, dengan memperhatikan perkembangan psikologis dan sosial.
- 2) Inovasi pembangunan harus menyetujui pemberdayaan semua potensi peserta didik seoptimal mungkin, dengan memberikan pelayanan, sesuai dengan kepedulian dan kebutuhan dilingkungannya.
 - 3) Inovasi pembelajaran harus mengakses pada strategi pengembangan berpikir tingkat tinggi untuk dapat menguasai IPTEK, seiring dengan pembinaan nilai untuk memperkuat sistem nilai (afektif), agar dapat mengambil peran kompetitif dalam gerak perubahan sosial dan persaingan global (psikomotorik).
 - 4) Inovasi pembelajaran dapat memungkinkan peserta didik memiliki kemampuan untuk mengakses berbagai sumber informasi.
 - 5) Inovasi pembelajaran perlu dijadikan unggulan, dalam melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan dengan dukungan kebijakan nasional, untuk menjadi gerakan budaya pendidikan.
 - 6) Inovasi perlu dilakukan, dengan berorientasi pada penyempurnaan dan peningkatan kualitas pembelajaran dan pengalaman yang ada, dengan dukungan penelitian dan evaluasi implementasi kurikulum.
 - 7) Inovasi pembelajaran perlu melibatkan secara optimal, guru sebagai inisiator dan inovator pembelajaran dengan memberikan peluang untuk mengembangkan kreatifitasnya.
 - 8) Inovasi pembelajaran perlu dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan partisipasi dan berbagai pihak, dengan dilakukan secara berkesinambungan.
 - 9) Inovasi pembelajaran memperhatikan aspek sosial budaya dan lingkungan peserta didik, dan faktor psikologis diarahkan pada pengembangan kemampuan berpikir secara kritis kreatif.
 - 10) Inovasi pembelajaran hendaknya mengembangkan secara optimal potensi berpikir peserta didik, untuk menguasai IPTEK yang terintegrasi dengan IMTAQ.

Inovasi pembelajaran merupakan unggulan untuk mengatasi kesenjangan antara tuntutan ideal kurikulum dan kebutuhan masyarakat dengan kualitas pendidikan. Untuk itu, perlu dilakukan secara terus-menerus dengan dukungan kebijakan nasional untuk membudayakan penelitian dalam bidang pembelajaran, sebagai

prasyarat bagi efektivitas inovasi pembelajaran. Keterlibatan guru sebagai pendidik dan subyek penelitian pembelajaran adalah mutlak, dengan dukungan kemampuan profesional dan sumber daya pendidikan, dalam peran sebagai subyek dalam inovasi pembelajaran.

Inovasi pembelajaran merupakan jawaban strategis untuk mengimbangi pengembangan pendidikan dengan pendekatan masalita selama ini, sekaligus menjawab tantangan dunia pendidikan dalam membina manusia Indonesia seluruhnya, dalam era globalisasi 2020. Inovasi tidak akan berhasil, tanpa dukungan yang kuat dan ilmu pengetahuan dan keguruan dan masyarakat anggota, masyarakat ilmiahnya termasuk LPTK sebagai dukungan kelembagaan.

Inovasi pembelajaran IPS pada hakekatnya, adalah upaya untuk memenuhi peningkatan mutu proses pendidikan yang dilakukan terus menerus, untuk memenuhi perkembangan tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. Pembelajaran IPS dapat dilakukan dalam kelompok belajar bersama, yang menekankan belajar pada kelompok. Selama ini dirasakan masih belum secara sengaja dikembangkan dalam proses pembelajaran, oleh karena itu merupakan tantangan dan tuntutan terhadap inovasi pembelajaran. Jika dilakukan, akan dapat mengatasi kelemahan pembelajaran yang selama ini dilakukan di lapangan. Namun demikian, keunggulan yang sudah ditemukan dalam berbagai penelitian dan studi pengembangan pembelajaran di negara lain, perlu mendapatkan validitas dalam situs masalah sosial budaya pendidikan di negara kita. Untuk itu, perlu sekali penelitian dilakukan untuk memberikan masukan bagi inovasi pembelajaran, yang akan dilakukan dalam peningkatan mutu pendidikan untuk mempersiapkan kualitas SDM dalam menyongsong 2020.



BAB III

Hakikat Pembelajaran IPS

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan bagian dari kurikulum yang mempunyai tanggungjawab terhadap usaha dalam membantu peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan terjemahan dari *Social Studies*. Bahwa *Social Studies* merupakan ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan meliputi aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu ekonomi, ilmu politik, sosiologi antropologi, psikologi, ilmu geografi dan filsafat yang dalam prakteknya dipilih untuk tujuan pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Bila dianalisis dengan cermat bahwa pengertian *social studies* mengandung hal-hal sebagai berikut:

1. *Social Studies* merupakan turunan dari ilmu-ilmu sosial
2. Disiplin ini dikembangkan untuk memenuhi tujuan pendidikan pada tingkat persekolahan maupun tingkat perguruan tinggi.
3. Aspek-aspek dari masing-masing disiplin ilmu social itu perlu diseleksi sesuai dengan tujuan tersebut.

A. Lahirnya Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Menurut Suria Sumantri (2016, p. 93), sumber dari semua ilmu ialah filsafat, dari filsafat tersebut lahirlah 2 (dua) cabang ilmu yaitu filsafat alam yang kemudian menjadi rumpun ilmu-ilmu alam (*the natural sciences*) dan filsafat moral yang kemudian berkembang ke dalam cabang ilmu-ilmu sosial (*the social sciences*). Ilmu-ilmu alam membagi diri menjadi dua kelompok yaitu yaitu ilmu alam (*the physical sciences*) dan ilmu hayat (*the biological sciences*). Ilmu alam bertujuan mempelajari zat yang membentuk alam semesta seperti fisika, kimia, astronomi, ilmu bumi, dan lain-lain. Ilmu-ilmu sosial berkembang agak lambat dibandingkan ilmu alam. Cabang-cabang ilmu-ilmu sosial di antaranya antropologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, geografi, ilmu politik dan lain-lain.

Menurut Setiawan (2015,p. 6-7) dalam dunia pengajaran, ilmu-ilmu sosial telah mengalami perkembangan, sehingga timbullah *social studies* atau di Indonesia disebut Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). IPS (*social studies*) pertama kali dimasukkan dalam kurikulum sekolah di Rugby (Inggris) pada tahun 1827, atau setengah abad setelah terjadinya Revolusi Industri pada abad ke-18. Berbeda halnya dengan di Inggris, *social studies* dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah Amerika Serikat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsanya. Setelah berlangsungnya Perang Budak pada tahun 1861-1865, bangsa Amerika Serikat yang terdiri dari berbagai macam ras sulit untuk menjadi satu bangsa, hal ini juga disebabkan perbedaan sosial ekonomi yang sangat tajam. Salah satu cara untuk menjadikan penduduk Amerika Serikat merasa satu bangsa yaitu bangsa Amerika dengan memasukkan *social studies* ke dalam kurikulum sekolah di negara bagian Wisconsin pada tahun 1892.

Nama asli IPS di Amerika Serikat adalah "*social studies*", istilah tersebut dipergunakan sebagai nama sebuah komite yaitu "*Committee of Social Studies*" yang didirikan pada tahun 1913 dengan tujuan sebagai wadah himpunan tenaga ahli yang berminat pada kurikulum Ilmu-ilmu Sosial di tingkat sekolah dan ahli-ahli Ilmu-ilmu Sosial yang mempunyai minat sama. Pada abad ke-20, sebuah Komisi Nasional dari *The National Education Association* memberikan rekomendasi tentang perlunya *social*

studies dimasukkan ke dalam kurikulum semua sekolah dasar dan sekolah menengah Amerika Serikat. Menurut Ahmadi (1991, p. 2), awalnya, *social studies* merupakan ramuan dari mata pelajaran sejarah, geografi, dan *civics*. *Social studies* berkembang dan berpengaruh terhadap program kurikulum pada sekolah-sekolah di Amerika Serikat sejak tahun 1940-an sampai sekarang.

Berbeda halnya dengan di Inggris dan di Amerika Serikat, latar belakang dimasukkannya bidang studi IPS ke dalam kurikulum sekolah Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau termasuk dalam bidang pendidikan sebagai akibat pemberontakan G.30 S/ PKI. Pada Replita 1 (1969-1974) Tim Peneliti Nasional di bidang pendidikan menemukan lima masalah nasional dalam bidang pendidikan. Kelima masalah tersebut antara lain: kuantitas (berkenaan dengan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar), kualitas (menyangkut peningkatan mutu lulusan), relevansi (kesesuaian sistem pendidikan dengan kebutuhan pembangunan), efektivitas sistem pendidikan dan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, pembinaan generasi muda untuk menyiapkan tenaga produktif.

Menurut Fatimah (2015, p. 4), penggunaan istilah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di Indonesia baru dimulai dengan ditetapkannya Kurikulum Nasional pada tahun 1975 yang diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Sebelum berlakunya kurikulum 1975 istilah IPS belum ada, walaupun beberapa mata pelajaran yang tergolong ke dalamnya telah diberikan di sekolah-sekolah yang mencakup Sejarah, Ilmu Bumi, Tata Negara dan Ekonomi. Kurikulum 1975 mengelompokkan semua mata pelajaran tersebut ke dalam IPS.

Ide dasar IPS di Indonesia banyak mengadopsi pendapat bangsa Amerika Serikat. Sedangkan materi, tujuan, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan tujuan pendidikan negara Indonesia. Hal ini disebabkan Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memberikan perhatian yang sangat besar dalam pengembangan kajian sosial. Amerika Serikat memiliki sebuah lembaga yaitu *National Council for the Social Studies* (NCSS) yang secara berkala melahirkan kajian-kajian akademiknya melalui sebuah jurnal. Amerika Serikat merupakan negara yang sangat plural, terdiri dari berbagai ras, bangsa, agama dan

kebudayaan sehingga masyarakatnya bersifat multikultural. Kondisi ini memiliki sejumlah persamaan dengan negara Indonesia.

B. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial (*Social Studies*)

Menurut Ahmadi (1991, p. 2-3) IPS merupakan ilmu-ilmu sosial yang dipilih dan disesuaikan bagi penggunaan program pendidikan di sekolah atau bagi kelompok belajar lainnya yang sederajat. Menurut Ali Imran Udin IPS ialah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah dasar dan menengah. Menurut Abu Ahmadi IPS ialah bidang studi yang merupakan paduan (fusi) dari sejumlah disiplin ilmu sosial. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa materi IPS diambil dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi sosial, ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, dan ilmu-ilmu sosial lainnya yang dijadikan sebagai bahan baku bagi pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran di sekolah dasar dan menengah.

Barr, dkk (1987, p. 193), *The committee on the social of the national education on asocation's and reorganisation of secondary education in 1916*, memberi definisi sebagai berikut: "*theose (studies) whose subject matter relates to the orgaisation and development of human society and to man as member of sosial group*". Maksudnya, studi sosial ialah mata pelajaran yang menggunakan bahan ilmu-ilmu sosial untuk mempelajari hubungan manusia dalam masyarakat dan manusia sebagai anggota masyarakat. Paul Mathis, dalam bukunya "*The Teacher Handbook for Social Studies*, mengartikan IPS sebagai: "*the study of man in society in the past, present and future. Social studies emerges as a subject of prime importance for study in school*". Artinya, studi sosial ialah mata pelajaran di sekolah untuk mempelajari manusia dalam masyarakat pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.

Ilmu-ilmu sosial merupakan dasar dari IPS. Akan tetapi, tidak semua ilmu-ilmu sosial secara otomatis dapat menjadi bahan atau pokok bahasan dalam IPS. Tingkat usia, jenjang pendidikan, dan perkembangan pengetahuan siswa sangat menentukan materi-materi ilmu-ilmu sosial mana yang tepat menjadi bahan atau pokok bahasan dalam IPS. Di Indonesia IPS menjadi salah satu mata pelajaran dalam pembaharuan kurikulum SD, SMP, SMA sejak 1975 dan masih

berlangsung hingga sekarang. IPS sangat penting diajarkan kepada peserta didik, sebab setiap individu ialah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Agar setiap individu menjadi warga negara yang baik maka ia perlu mendapatkan pengetahuan yang benar tentang konsep dan kaidah-kaidah sosial, menentukan sikap sesuai dengan pengetahuan tersebut dan memiliki keterampilan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Disiplin ilmu-ilmu sosial yang dikembangkan dalam *social studies* di Indonesia meliputi ilmu ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi, politik, hukum dan pendidikan kewarganegaraan. Disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam *social studies* di Amerika Serikat lebih beragam bila dibandingkan dengan tradisi pengembangan IPS di Indonesia. Disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam *social studies* di Amerika Serikat meliputi antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, religi dan sosiologi.

C. Istilah Ilmu-ilmu Sosial (*Social Sciences*) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (*Social Studies*)

Istilah dalam ilmu-ilmu sosial dan Ilmu Pengetahuan sosial merupakan dua hal yang berbeda dan memiliki tujuan yang sama dalam kehidupan sosial. Ilmu sosial dikenal akrab dengan ilmu yang membahas tentang hubungan manusia dengan lingkungannya, atau interaksi antara manusia dengan lingkungan nya. Sedangkan Ilmu Pengetahuan Sosial lebih disederhanakan dengan disiplin ilmu sosial dan humaniora, serta disajikan secara ilmiah dan paedagogik/psikologis untuk tujuan Pendidikan. Menurut Sumaatmadja (1986, p. 22), terdapat perbedaan yang esensial antara ilmu-ilmu sosial (*social sciences*) dengan ilmu pengetahuan sosial (*social studies*). Menurut Norman Maz Kenzie ilmu-ilmu sosial (*social sciences*) dapat diartikan sebagai semua bidang ilmu pengetahuan mengenai manusia dalam konteks sosialnya atau sebagai anggota masyarakat. Sedangkan *The committee on the social of the national education on asociation's and reorganisation of secondary education in 1916* menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan sosial (*social studies*) ialah mata pelajaran yang menggunakan bahan ilmu-ilmu sosial untuk mempelajari hubungan manusia dalam masyarakat dan manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut Setiawan (2015, p. 4) pendidikan

IPS ialah suatu program studi dan bukan disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial (*social sciences*), maupun dalam ilmu pendidikan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu-ilmu sosial berbeda dengan ilmu pengetahuan sosial, beberapa perbedaan tersebut yaitu:

1. Aspek kehidupan manusia yang menjadi objek studi ilmu-ilmu sosial terpisah, misalnya sosiologi objek studinya interaksi sosial, antropologi objek studinya kebudayaan, ekonomi objek studinya kebutuhan manusia, geografi objek studinya ruang atau interelasi manusia dengan faktor alam pada ruang, ilmu politik objek studinya kekuasaan, sejarah objek studinya waktu atau riwayat masa lampau, psikologi sosial objek studinya proses mental manusia sebagai makhluk sosial. Sedangkan, IPS bukan disiplin ilmu mandiri seperti ilmu-ilmu sosial lainnya. IPS juga mengkaji manusia dalam konteks sosialnya, namun, IPS mengkaji aspek kehidupan sosial manusia sebagai satu kebulatan atau unidimensional.
2. Ilmu-ilmu sosial (*social sciences*) lebih dipusatkan pada pengkajian ilmu murni. Kerangka kerja ilmu-ilmu sosial lebih diarahkan kepada pengembangan teori dan prinsip ilmiahnya. Setiap disiplin ilmu-ilmu sosial (sosiologi, antropologi, sejarah, geografi, ilmu politik, ekonomi, dan lain-lain) berusaha untuk mengembangkan kajiannya sesuai dengan alur keilmuannya. Oleh sebab itu, ilmu-ilmu sosial tidak menekankan aspek pendidikan, namun ilmu-ilmu sosial dirumuskan sebagai disiplin akademik mengenai manusia dan konteks sosialnya yakni berusaha mengetahui apa dan menjelaskan mengapa (*to describe and to explain*). Sedangkan ilmu pengetahuan sosial (*social studies*) lebih menekankan pada aspek pendidikannya. Oleh sebab itu, IPS disebut juga pendidikan IPS. Materi IPS diambil dari ilmu-ilmu sosial untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran.

Menurut Somantri (2001, p. 198), ilmu yang disajikan dalam pendidikan IPS merupakan *synthetic* antara ilmu-ilmu sosial dengan ilmu pendidikan untuk tujuan pendidikan. Ilmu yang dikembangkan

dalam pendidikan IPS merupakan hasil seleksi, adaptasi, dan modifikasi dari hubungan antar disiplin ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan. Mengenai karakteristik pendidikan IPS sebagai *syhthetic discipline* dijelaskan oleh Numan Somantri disebabkan pendidikan IPS bukan hanya harus mampu mensintesis konsep-konsep yang relevan antara ilmu-ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu sosial, melainkan juga tujuan pendidikan dan pembangunan serta masalah-masalah sosial dalam hidup bermasyarakatpun akan menjadi pertimbangan bahan pendidikan IPS. Berdasarkan kurikulum 2013 IPS untuk SD/ MI IPS disajikan secara tematik, untuk tingkat SMP/ MTs IPS disajikan secara terpadu, sedangkan untuk tingkat SMA/ MA/ SMK/ MAK IPS diberikan sebagai mata pelajaran yang terpisah yang terdiri dari Sejarah, Geografi, Ekonomi, Sosiologi dan Antropologi.

D. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial (*Social Studies*)

Barr (1987, p. 197) tujuan pendidikan nasional menjadi acuan dalam pengembangan tujuan pendidikan IPS. Tujuan pengajaran IPS, secara umum dikemukakan oleh Fenton adalah mempersiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik, mengajar anak didik agar mempunyai kemampuan berpikir dan dapat melanjutkan kebudayaan bangsa. Selanjutnya, Clark dalam bukunya "*Social Studies in Secondary School*": *A Hand Book*, menyatakan bahwa IPS menitikberatkan pada perkembangan individu yang dapat memahami lingkungan sosialnya, manusia dengan segala kegiatannya dan interaksi antarmereka. Peserta didik diharapkan dapat menjadi anggota yang produktif, berpartisipasi dalam masyarakat yang merdeka, mempunyai rasa tanggung jawab, tolong menolong dengan sesamanya, dan dapat mengembangkan nilai-nilai dan ide-ide dari masyarakatnya. Menurut Hartono dan Arnicon Aziz (1990, p. 3) IPS bertujuan untuk pembentukan pengetahuan dan keterampilan intelektual peserta didik.

IPS sebagai komponen kurikulum sekolah merupakan kesempatan yang baik untuk membina afeksi, kognisi, dan psikomotor pada anak didik untuk menjadi manusia pembangunan Indonesia. Bahan kajian IPS bukanlah hal yang bersifat hafalan belaka, melainkan konsep dan generalisasi yang diambil dari analisis tentang manusia dan

lingkungannya. Pengetahuan yang diperoleh dengan pengertian dan pemahaman akan lebih fungsional. Perolehan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki siswa diharapkan dapat mendorong tindakan yang berdasarkan nalar, selanjutnya dapat diterapkan dalam kehidupannya. Nilai dan sikap merupakan hal yang penting dalam ranah afektif, terutama nilai dan sikap terhadap masyarakat dan kemanusiaan. Sebagai contohnya menghargai martabat manusia dan peka terhadap perasaan orang lain, lebih-lebih lagi nilai dan sikap terhadap negara dan bangsa. Tujuan keterampilan yang dapat diraih dalam pengajaran IPS sangatlah luas. Keterampilan-keterampilan yang dikembangkan sudah barang tentu juga meliputi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk memperoleh pengetahuan, nilai, dan sikap.

Menurut Bruce Joyce (Cheppy, p. 14-15), ada 3 tujuan IPS, yaitu:

1. *Humanistic education*: diharapkan IPS mampu membentuk anak didik untuk memahami segala pengalamannya serta diharapkan lebih mengerti tentang arti kehidupan ini.
2. *Citizenship education*: setiap anak didik harus dipersiapkan untuk mampu berpartisipasi secara efektif di dalam dinamika kehidupan masyarakatnya. masyarakat diliputi segala aktivitas yang menyandarkan setiap warganegara untuk bekerja secara benar dan penuh tanggungjawab demi kemajuannya.
3. *Intellectual education*: tiap anak didik ingin memperoleh cara dan sarana untuk mengadakan analisis terhadap gagasan-gagasan serta mengadakan pemecahan masalah seperti yang telah dikembangkan oleh ahli-ahli ilmu sosial. Bersamaan dengan pertumbuhan kemampuannya, anak didik seharusnya belajar untuk menjawab sebanyak mungkin pertanyaan serta menguji data secara kritis dalam berbagai situasi sosial.

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPS di tingkat sekolah bertujuan mempersiapkan peserta didik sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang baik harus menguasai pengetahuan (*knowledge*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) dan keterampilan (*skill*) yang membantunya untuk memahami lingkungan sosialnya dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah pribadi dan masalah sosial, mampu mengambil keputusan serta

berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Astawa (2017, p. 42), IPS dirumuskan berlandaskan pada realitas dan fenomena sosial yang diwujudkan dengan pendekatan interdisipliner dari cabang-cabang Ilmu-ilmu sosial. Tujuan pembelajaran IPS ialah mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan melatih keterampilan untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa diri sendiri maupun masyarakat.

Pembelajaran geografi memberikan kebulatan wawasan berkenaan dengan wilayah-wilayah. Sedangkan sejarah memberikan wawasan berkenaan dengan peristiwa-peristiwa dari berbagai periode. Antropologi meliputi studi-studi komparatif mengenai nilai-nilai kepercayaan, struktur sosial, aktivitas ekonomi, organisasi politik, ekspresi-ekspresi dan spritual, teknologi dan benda-benda budaya dari budaya-budaya terpilih. Ilmu politik dan ekonomi tergolong ke dalam ilmu-ilmu tentang kebijakan pada aktivitas-aktivitas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan. Sosiologi dan psikologi sosial merupakan ilmu-ilmu tentang perilaku seperti konsep peran, kelompok, institusi, proses interaksi dan kontrol sosial. Konsep-konsep tersebut secara intensif digunakan oleh ilmu-ilmu sosial dan studi-studi sosial.

Secara akademik, karakteristik mata pelajaran IPS dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi,, hukum, politik, kewarganegaraan, sosiologi bahkan juga humaniora, pendidikan dan agama.
2. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau tema.

E. Landasan Pendidikan IPS

Menurut Sapriya (2017, p. 15-17), Pendidikan IPS sebagai mata pelajaran seyogianya mempunyai landasan dalam pengembangan baik sebagai mata pelajaran maupun pendidikan disiplin ilmu. Landasan ini

diharapkan akan dapat memberikan pemikiran-pemikiran mendasar tentang pengembangan struktur, metodologi, dan pemanfaatan Pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Bagaimana dan mengapa struktur dan disiplin ilmu tersebut dibangun dan dikembangkan ke arah, tujuan, dan sasaran pengembangan dilakukan oleh masyarakat ilmiahnya. Landasan-landasan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu meliputi landasan filosofis, ideologis, sosiologis, antropologis, kemanusiaan, politis, pedagogis dan religius.

1. Landasan Filosofis

Memberikan gagasan pemikiran mendasar yang digunakan untuk menentukan apa objek kajian dan domain apa saja yang menjadi kajian pokok dan dimensi pengembangan PENDIDIKAN IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu (aspek ontologis). Bagaimana cara, proses dan metode mengembangkan PENDIDIKAN IPS sehingga menentukan pengetahuan mana yang dianggap sah, valid, terpercaya dan benar. Apa tujuan PENDIDIKAN IPS sebagai disiplin ilmu ini dibangun dan dikembangkan serta digunakan atau apakah manfaat dari PENDIDIKAN IPS ini telah dan akan memperkokoh *body of knowledge* PENDIDIKAN IPS untuk eksis dan berkembang lebih luas lagi. Selama ini dikenal ada empat filsafat pendidikan yang meliputi perenialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme.

2. Landasan Ideologis

Dimaksudkan dengan sistem gagasan mendasar untuk memberi pertimbangan dan menjawab pertanyaan:

- a. Bagaimana keterkaitan antara *das sein* Pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu dan *das solen* Pendidikan IPS
- b. Bagaimana keterkaitan antara teori-teori pendidikan dengan hakikat dan praksis etika, moral, politik dan norma-norma perilaku dalam membangun dan mengembangkan Pendidikan IPS. Menurut O'Neil, ideologi dalam landasan ini telah dan akan memberikan sistem gagasan yang bersifat ideologis terhadap Pendidikan IPS yang tidak cukup diatasi hanya oleh filsafat yang bersifat umum.

3. Landasan Sosiologis

Memberikan sistem gagasan mendasar untuk menentukan cita-cita, kebutuhan kepentingan, kekuatan, aspirasi serta pola kehidupan

masa depan melalui interaksi sosial yang akan membangun teori-teori dan prinsip-prinsip Pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu. Landasan ini akan dan telah memberikan dasar-dasar sosiologis terhadap pranata dan institusi pendidikan dalam proses perubahan sosial yang konstruktif.

4. landasan Antropologis

Memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar dalam menentukan pola, sistem dan struktur pendidikan disiplin ilmu sehingga relevan dengan pola, sistem dan struktur kebudayaan bahkan pola, sistem dan struktur perilaku manusia yang kompleks. Landasan ini telah dan akan memberikan dasar-dasar sosio-kultural masyarakat terhadap struktur Pendidikan IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu dalam proses perubahan sosial yang konstruktif.

5. Landasan Kemanusiaan

Menurunkan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan karakteristik manusia sebagai sasaran proses pendidikan. Landasan ini sangat penting karena pada dasarnya proses pendidikan ialah proses memanusiakan manusia.

6. Landasan Politis

Memberikan arah gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan arah dan garis kebijakan dalam politik pendidikan Pendidikan IPS. Peran dan keterlibatan pihak pemerintah dalam landasan ini sangat besar sehingga pendidikan tidak mungkin steril dari campur tangan unsur birokrasi.

7. Landasan Psikologis

Memberikan gagasan-gagasan mendasar untuk membentuk cara-cara Pendidikan IPS membangun struktur tubuh disiplin pengetahuan, baik dalam tataran personal maupun komunal berdasarkan entitas-entitas psikologisnya. Hal ini sejalan dengan hakikat dan struktur yang dapat dipelajari, dialami dan didiversifikasi, diklasifikasikan oleh anggota komunitas Pendidikan IPS berdasarkan kapasitas psikologis dan pengalamannya.

8. Landasan Religius

Memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar tentang nilai-nilai, norma, etika, dan moral yang menjadi jiwa pendidikan di Indonesia. Landasan ini telah berlaku sejak zaman Plato hingga Kant yang

kemudian diakomodasi oleh Brameld melalui karya-karya khususnya dalam filsafat rekonstruksionisme. Landasan religius ini telah dan akan menolak segala sesuatu yang bersifat relatif semata yang tidak menempatkan agama sebagai landasan berfikir atau kelompok manusia yang merasa menjadi pemenang dalam mengembangkan peradaban manusia. Landasan religius yang diterapkan di Indonesia menghendaki adanya keseimbangan antara pengembangan materi yang berkembang dari *interpretative knowledge*.



BAB IV

Sejarah Perkembangan Pendidikan IPS

A. Perkembangan IPS di Negara Lain

Menurut Sapriya (2017, p. 34-39), perkembangan IPS dapat ditelusuri dari sebuah karya Saxe yang berjudul *Social Studies in Schools: A History of the Early Years*. Menurut Saxe, pada awal pertumbuhannya, IPS dapat diidentifikasi dari *the National Herbart Society Papers of 1896-1897*, yakni sebagai upaya membatasi ilmu-ilmu sosial untuk penggunaan secara pedagogik. IPS sebagai satu kesatuan sistem dalam kurikulum pendidikan sangat erat kaitannya dengan kurikulum ilmu sejarah, Geografi dan Civics. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, IPS telah dijadikan sebagai istilah resmi dalam kurikulum pendidikan, khususnya di Amerika Serikat.

Konsep tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar pemikiran perlunya *social studies* seperti terdapat di dalam dokumen *Statement of the Chairmant of Committee on Social Studies*. Thomas Jesse Jones yang dikeluarkan oleh *Committee on Social Studies (CSS)* tahun 1913. Dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa Pendidikan IPS sebagai *a specific field to utilization of social sciencies data as a force in the improvement of human welfare*, yang memiliki kesamaan konseptual dengan definisi

social studies dari Heber Newton, bahwa *social studies* sebagai *pecially selected from the social sciences for the purpose of improving the lot or the poor and suffering urban worker*.

Tujuan Pendidikan IPS ialah mendidik siswa menjadi warga negara yang baik, warga masyarakat yang konstruktif dan produktif yaitu warga negara yang memahami dirinya sendiri dan masyarakatnya, mampu merasa sebagai warga negara, berpikir sebagai warga negara, bertindak sebagai warga negara, dan jika mungkin juga mampu hidup sebagaimana layaknya warga negara.

Untuk mencapai tujuan tadi, Pendidikan IPS tidak memberikan pengetahuan yang rinci dan lengkap dari setiap bidang ilmu, melainkan sejauh materi-materi tersebut memiliki signifikansi kuat pada diri siswa dan komunitasnya, serta bisa meningkatkan hasrat mereka untuk lebih jauh mengerti dirinya dan lingkungannya. Materi-materi dari tangan pertama atau yang diangkat dari lingkungan setempat, utamanya yang memahamkan siswa tentang relasi mutualistik dari kekuatan-kekuatan dan peristiwa-peristiwa sekitar yang bisa diamati dan dicermati dalam aktivitas keseharian di sekolah sangat disarankan, daripada materi-materi yang terdapat di dalam buku-buku teks. Kecuali yang memuat kondisi-kondisi dan pengalaman-pengalaman aktual, atau topik-topik keseharian seperti sanitasi, kesehatan, perumahan, makanan alami, pekerja siswa, rekreasi, dan pendidikan sosial.

Pada tahun 1915, *Committee on Social Studies* mengeluarkan sebuah dokumen yang bernama "*the Teaching of Community Civics*". Dalam dokumen tersebut dirumuskan konsep warga negara yang baik sebagai sosok pribadi yang sudah terbiasa melakukan sesuatu untuk kesejahteraan individu dan masyarakat secara cerdas dan aktif bekerja sama dengan anggota masyarakat lain hingga akhir hayatnya.

Menurut CSS, pendidikan di lingkungan rumah atau keluarga adalah faktor pertama dalam pengembangan warga negara yang baik. CSS pun memberikan rekomendasi konsep *social studies* sebagai *socially oriented education* atau lebih dikenal dengan istilah *community civics*. Menurut CSS, *community civics* sebagai elemen terpenting dari warga negara yang baik, merupakan kondisi kewarganegaraan di dalam konteks komunitasnya. Warga negara yang baik ialah mereka yang memiliki perasaan sosial, pikiran sosial dan melakukan tindakan sosial.

Rekomendasi *social studies* yang dirumuskan dalam dokumen CSS tahun 1913, 1915, dan 1916 merupakan konsep awal dan sangat berharga bagi “*National Council for the Social Studies*” atau NCSS yang berdiri tahun 1921. Dapat dianggap bahwa gagasan-gagasan CSS menjadi bahan berharga bagi NCSS yang hingga saat ini tetap eksis bahkan semakin berkembang. Dengan kata lain, NCSS merupakan palanjut dan pemelihara hasil-hasil pendidikan termasuk tujuan kewarganegaraan yang telah dicapai oleh CSS.

Pada tahun 1935, tepatnya tanggal 28-30 Nopember 1935 atau 14 tahun setelah berdirinya, NCSS mengadakan pertemuan pertama dan keputusan pentingnya berhasil meletakkan dasar-dasar pemikiran *social studies* berbasis intelektual-keilmuan atau *social sciences as the core of the curriculum*. Pada periode ini muncul pemikiran Edgar Wesley, salah seorang staf CSS berjudul *The Teaching the Social Studies*. Dalam karyanya tersebut, Wesley berhasil merumuskan definisi *social studies* yang selanjutnya dijadikan sebagai definisi resmi oleh *the united states of education’s standard terminology for curriculum and instruction*. Definisi ala Wesley yang dimaksudkan adalah *social studies are the social sciences simplified for pedagogical purposes*. Walaupun karya Wesley tersebut bukan bagian dari laporan yang ditugaskan oleh NCSS, akan tetapi definisi ini justru yang paling luas mendapat sambutan dari kalangan praktisi dan guru *social studies*.

Pada era tahun 1960-an bagi kalangan komunitas akademik Pendidikan IPS sering diklaim sebagai *era The New Social Studies* yaitu suatu gerakan pembaharuan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas program Pendidikan IPS, melalui penguasaan kemampuan intelektual tingkat tinggi, dengan menampatkan metode inkuiri dan pendekatan struktur disiplin ilmu sebagai substansi kajian kurikulum.

Meskipun demikian, gerakan pembaharuan Pendidikan IPS pada era 1960-an tidak lepas dari kritik. Pada tahun 1970-an, muncul kritik dari Shaver dalam surat yang ditujukan kepada NCSS menyatakan bahwa “*the structure of the discipline approach that dominated most curriculum development projects... social studies in 1960 was a fad that exemmplified our long standing and unthinking subservience to professors in the*

academic disciplines". Sehingga program (kurikulum) Pendidikan IPS lebih menunjukkan tingkat fragmentasi intelektual yang tinggi.

Pada tahun 1985, giliran Smith yang mengkritik gerakan *The New Social Studies*. Ia berpendapat bahwa hasil-hasil pengembangan kurikulum dari proyek tahun 1960-an tersebut gagal karena:

1. Ada kecenderungan bahwa reformasi kurikulum dilakukan hanya karena tersedia dana yang memadai, walaupun sesungguhnya tidak ada kebutuhan untuk melakukan reformasi
2. Para guru tidak banyak dilibatkan dalam pengembangan materinya, sehingga hasilnya tidak merefleksikan realitas pembelajaran di kelas
3. Dalam orientasinya kurikulum tersebut bersifat positivistik, serta tidak diorientasikan kepada kebutuhan kewarganegaraan.

Meskipun demikian, apabila dikaji secara seksama maka kritik-kritik yang dilontarkan terhadap hasil-hasil pengembangan program Pendidikan IPS tahun 1960-an di atas, lebih cenderung untuk menyerat PENDIDIKAN IPS ke dalam kerangka berpikir ilmu-ilmu sosial, yaitu pada penguasaan struktur disiplin ilmu yang tampak begitu kuat dan mengkristal di dalam keyakinan para penggagas gerakan *the New Social Studies*.

Walaupun banyak kritik terhadap lahirnya gerakan *The New Social Studies*, namun ada sejumlah sisi positifnya, yakni:

1. Karena gerakan tersebut menandai terjadinya perubahan orientasi dalam Pendidikan IPS dari program pendidikan sosial menjadi program pendidikan ilmu-ilmu sosial.
2. Pemikiran-pemikiran yang menjadi keyakinan epistemologis bagi para pengembang program Pendidikan IPS baru semakin menegaskan arti penting sifat integratif dari program Pendidikan IPS, serta betapa kepentingan siswa sebagai hal pokok dalam pengembangannya, seperti telah menjadi komitmen dan jati diri awal Pendidikan IPS.
3. Bahwa antara tahun 1960 hingga 1975 merupakan periode terjadinya reformasi dan perkembangan yang sesungguhnya di dalam pendidikan sosial.

Dalam konteks reformasi ini, *Task Force on Scope and Sequence of National Council for the Social Studies* (NCSS) pada tahun 1984

merumuskan definisi Pendidikan IPS sebagai berikut: Pendidikan IPS dapat didefinisikan sebagai suatu bidang kajian dalam kurikulum sekolah yang tujuan-tujuannya diturunkan dari hakikat kewarganegaraan di dalam masyarakat demokratis, serta yang berkaitan dengan masyarakat-masyarakat lainnya, yang kontennya berasal dari ilmu-ilmu sosial dan disiplin-disiplin yang lain, serta dari hasil refleksi pribadi, sosial dan pengalaman-pengalaman budaya siswa.

Salah satu karakteristik dari definisi *social studies* ialah bersifat dinamis, artinya selalu berubah sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Di Amerika Serikat, misalnya *the National Council for the Social Studies* (NCSS), organisasi para ahli pendidikan IPS yang cukup handal sebelum tahun 1978 merumuskan Pendidikan IPS sebagai program yang dibangun oleh sejumlah disiplin ilmu sosial yakni sejarah, ekonomi, sosiologi, kewarganegaraan, geografi dan semua modifikasi atau kombinasi mata pelajaran terutama yang memiliki materi dan tujuan yang berhubungan dengan masalah-masalah kemasyarakatan. Pada dua dekade terakhir, NCSS telah mengubah definisi *social studies* sebagai berikut:

Social studies is a basic subject of the K-12 curriculum that (1) derives its goals from the nature of citizenship in a democratic society that is closely linked to other nations and peoples of the world; (2) draws its contents primarily from history, the social sciences, and in some respects, from the humanities and science; and (3) is taught in ways that reflect an awareness of the personal, social, and cultural experiences and developmental levels of learners.

Menurut rumusan NCSS, *social studies* ialah mata pelajaran yang bersifat dasar yang ada di dalam kurikulum, sekolah dasar, dan sekolah menengah. Tujuannya berkaitan erat dengan hakikat kewarganegaraan ialah mempersiapkan warga negara untuk hidup dalam masyarakat demokratis dan dapat berhubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pokok bahasannya mengacu pada sejarah, ilmu-ilmu sosial, humanitis dan ilmu alam. Pembelajaran *social studies* disampaikan dengan cara-cara yang mencerminkan suatu kesadaran akan pengalaman pribadi, sosial, dan budaya serta tingkat perkembangan siswa.

Pada tahun 1922, dewan Direktur NCSS terutama personil yang tergabung dalam himpunan para pengajar di bidang *social studies* merumuskan definisi *social studies* sebagai berikut:

Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities to promote civics competence. Within the school program, social studies provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, archeology, economics, geography, history, law philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well as appropriate content from humanities, mathematics, and natural sciences. The primary purpose of social studies is to help young people develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an interdependent world.

Rumusan dari NCSS ini menunjukkan bahwa materi *social studies* semakin meluas karena merupakan gabungan dari berbagai disiplin ilmu, bukan hanya ilmu-ilmu sosial melainkan juga dari humanitis, matematika dan ilmu-ilmu alam bahkan agama. Dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa *social studies* untuk Amerika Serikat menggunakan pendekatan integrasi. Karena tujuan *social studies* untuk membantu para remaja dalam mengembangkan potensinya agar menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat demokratis maka *social studies* disajikan sebagai mata pelajaran untuk para siswa persekolahan dari mulai TK sampai para siswa tingkat SLTA.

B. Perkembangan Pendidikan IPS dalam Sistem Pendidikan di Indonesia

Menurut Sapriya (2017, p. 39-46), perkembangan IPS di dunia khususnya di Amerika Serikat telah banyak memenuhi pemikiran Pendidikan IPS di Indonesia. Namun, untuk menelusuri perkembangan pemikiran atau konsep pendidikan IPS di Indonesia secara historis dirasakan sulit. Hal ini diakui oleh Winaputra karena dua alasan, yaitu:

1. Di Indonesia belum ada lembaga profesional bidang pendidikan IPS setara dan sekuat NCSS atau SSEC. Lembaga serupa yang dimiliki Indonesia, yakni HISPENDIDIKAN IPSI (Himpunan

Sarjana IPS Indonesia yang sekarang telah berubah nama menjadi HISPISI = Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia), usianya masih sangat muda dan produktivitas akademisnya masih belum optimal.

2. Perkembangan kurikulum dan pembelajaran IPS sebagai ontologi ilmu pendidikan (disiplin) IPS sampai saat ini sangat tergantung pada pemikiran individual dan atau kelompok pakar yang ditugasi secara insidental untuk mengembangkan perangkat kurikulum IPS melalui Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan Balitbang Dikbud (Puskur). Selain itu, tradisi yang dikembangkan oleh komunitas akademik khususnya melalui HISPISI belum dapat menembus atau mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pengembangan kurikulum sebagaimana yang telah dilakukan oleh NCSS dan SSEC di Amerika Serikat.

Keberadaan pendidikan IPS dalam sistem pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sistem kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia. Seperti telah dikemukakan oleh sejumlah pakar bahwa secara embrionik kurikuler, pendidikan IPS di lembaga pendidikan formal atau sekolah di Indonesia pernah dimuat dalam kurikulum tahun 1947, kurikulum berpusat mata pelajaran terurai tahun 1952, kurikulum 1964, dan kurikulum 1968. Baru dalam kurikulum tahun 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum tahun 1994, pendidikan IPS telah menjadi salah satu mata pelajaran yang berdiri sendiri pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang disesuaikan dengan karakteristik atau kebutuhan peserta didik. Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka tidak ada lagi kurikulum yang bersifat terpusat (kurikulum nasional). Menurut PP tersebut, penyusunan kurikulum menjadi kewenangan satuan pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum yang berlaku adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pemerintah pusat yang menugaskan kepada Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) hanya berkewajiban menyusun standar nasional termasuk dalam membuat Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang mulai tahun 2006 diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22

tentang Standar Isi (SI) dan nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

1. Pendidikan IPS pada tahun 1945-1964

Pada kurun waktu tahun 1945-1964 istilah IPS di Indonesia belum dikenal. Namun, pembelajaran yang memiliki karakteristik sama dengan IPS merujuk kepada definisi *social studies* menurut Edgar Wesley yang menyatakan bahwa pendidikan IPS ialah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Kenyataan ini dapat dilihat dari adanya mata pelajaran sejarah, geografi, *civics*, koperasi yang disampaikan secara terpisah di sekolah dasar, dan mata pelajaran ekonomi, sosiologi, antropologi di sekolah menengah.

2. Pendidikan IPS dalam Kurikulum 1964-1968

Dalam kurikulum 1964, ada perubahan pendekatan dalam pengajaran IPS di Indonesia, meskipun istilah IPS pada kurun waktu ini belum dikenal. Dimiyati menamakan pendekatan yang digunakan bersifat korelatif dari ilmu-ilmu sosial. Dalam kurikulum tersebut, ada mata pelajaran pendidikan kemasyarakatan yang terdiri atas korelasi dari mata pelajaran ilmu bumi, sejarah dan *civics*. Pada tahun 1968, terjadi perubahan kurikulum yang ditandai oleh adanya pengelompokan mata pelajaran sesuai dengan orientasi dan perkembangan pendidikan. Pada saat ini mulai diperkenalkan nama pendidikan kewarganegaraan sehingga pendidikan kemasyarakatan diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan yang merupakan korelasi dari ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan.

Ketika kurikulum 1968 masih berlaku, istilah IPS mulai muncul dalam seminar nasional tentang *Civics Education* tahun 1972 di Tawang Manggu Solo. Menurut Winataputra, dalam laporan seminar tersebut ada tiga istilah yang muncul dan digunakan secara bertukar-pakai, yakni pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial, yang diartikan sebagai suatu studi masalah-masalah sosial yang dipilih dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan bertujuan agar masalah-masalah sosial itu dapat dipahami siswa.

IPS sebagai mata pelajaran pertama sekali masuk ke dalam dunia persekolahan pada tahun 1972-1973 yakni dalam kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Bandung. Pada saat itu, mata pelajaran IPS belum masuk ke dalam kurikulum SD, SMP, dan SMA.

Menurut Winataputra dalam Kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan atau studi sosial sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Dalam kurikulum SD PPSP tersebut, IPS diartikan sama dengan Pendidikan Kewarganegaraan.

3. Pendidikan IPS dalam Kurikulum 1975 dan 1984

Sebagai hasil kesepakatan komunitas akademik pada tahun sebelumnya, maka pada tahun 1975 mulai diperkenalkan mata pelajaran IPS dalam sistem kurikulum di Indonesia, IPS sebagai mata pelajaran baru dalam kurikulum 1975 diberikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA menggunakan pendekatan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan karakteristik peserta didik yang ada di tiap jenjang tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum ini adalah berbasis pada materi pelajaran. Ciri yang menonjol dari pengembangan materi dalam kurikulum ini ialah pengembangan dimensi nilai berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Winataputra kurikulum 1975 menampilkan pendidikan IPS dalam empat profil sebagai berikut:

- a. Pendidikan moral pancasila menggantikan pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi *citizenship transmission*.
- b. Pendidikan IPS terpadu (*integrated*) untuk sekolah dasar
- c. Pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, ekonomi koperasi.
- d. Pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SPG.

Dalam kurikulum 1984, pengajaran IPS di sekolah khususnya pada jenjang sekolah menengah diuraikan berdasarkan disiplin ilmu sosial untuk masing-masing mata pelajaran atau bahkan pembahasan tersendiri secara terpisah. Pada hakikatnya, model kurikulum 1984 untuk jenjang SMP dan SMA tidak banyak mengalami perubahan karena sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1975. Demikian pula untuk jenjang SD, mata pelajaran IPS tidak mengalami perubahan artinya kurikulum yang berlaku adalah kurikulum 1975.

4. Pendidikan IPS dalam Kurikulum 1994

Pada Kurikulum 1994, mata pelajaran IPS mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal ini terjadi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebagai implikasi dari pelaksanaan UU tersebut muncul kajian kurikuler yang menggantikan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kedudukan PPKn ini masih tetap sebagai mata pelajaran dalam lingkup IPS khusus dan wajib diikuti oleh semua siswa pada semua jenjang (SD, SMP, dan SMA). Untuk mata pelajaran IPS, kurikulum 1994 menetapkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Mata pelajaran IPS untuk SD masih tetap menggunakan pendekatan terpadu (*integrated*) dan berlaku untuk kelas III s.d kelas VI sedangkan untuk kelas I dan II tidak secara eksplisit bahwa IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri
- b. Mata pelajaran IPS untuk SMP tidak mengalami perubahan pendekatan artinya masih bersifat terkonfederasi yang mencakup geografi, sejarah dan ekonomi koperasi
- c. Mata pelajaran IPS untuk SMA menggunakan pendekatan terpisah-pisah (*saparated*) atas mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum untuk kelas I dan II, ekonomi dan geografi untuk kelas I dan II, sosiologi kelas II, sejarah budaya untuk kelas III program bahasa, ekonomi, sosiologi, tata negara, dan antropologi untuk kelas III program IPS.

Khusus untuk IPS SD, materi pelajaran dibagi atas dua bagian, yakni materi sejarah dan materi pengetahuan sosial. Materi pengetahuan sosial meliputi lingkungan sosial, geografi, ekonomi dan politik atau pemerintahan sedangkan cakupan materi sejarah meliputi sejarah lokal dan sejarah nasional. Tujuannya ialah untuk mengembangkan pengetahuan siswa dan keterampilan dasar yang akan digunakan dalam kehidupannya serta meningkatkan rasa nasionalisme dari peristiwa masa lalu hingga masa sekarang agar para siswa memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air.

Karena IPS untuk SMP dan SMA menganut pendekatan konfederasi dan terpisah-pisah maka tujuannya disesuaikan dengan karakteristik tiap mata pelajaran yang terpisah-pisah. Tujuan mata

pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum untuk SMA, misalnya adalah untuk menanamkan pemahaman tentang perkembangan masyarakat masa lampau hingga masa kini, menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta rasa bangga sebagai warga bangsa Indonesia, dan memperluas wawasan hubungan masyarakat antar bangsa di dunia.

Mata pelajaran ekonomi bertujuan untuk memberikan pengetahuan konsep-konsep dan teori sederhana dan menerapkannya dalam pemecahan masalah-masalah ekonomi yang dihadapinya secara kritis dan objektif. Mata pelajaran sosiologi memiliki tujuan untuk memberikan kemampuan memahami secara kritis berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang muncul sehubungan dengan perubahan masyarakat dan budaya, menanamkan kesadaran perlunya ketentuan masyarakat, dan mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi sosial budaya sesuai dengan kedudukan, peran, norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

Mata pelajaran geografi bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dan sikap rasional yang bertanggung jawab dalam menghadapi gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta permasalahannya yang timbul sebagai akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Adapun mata pelajaran tata negara bertujuan untuk meningkatkan kemampuan agar siswa memahami penyelenggaraan negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peralihan negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peradilan negara sesuai dengan tata kelembagaan negara, tata peradilan, sistem pemerintahan Negara RI maupun negara lain.

5. Pendidikan IPS dalam Permendiknas

Memasuki abad 21 yang ditandai oleh perubahan mendasar dalam segala aspek kehidupan khususnya dalam bidang politik, hukum, dan kondisi ekonomi telah menimbulkan perubahan yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Setelah perubahan kurikulum 1994 secara tambal sulam yakni melalui perubahan dengan diberlakukannya Kurikulum Suplemen ternyata dirasakan masih belum memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, para ahli pengembang kurikulum yang difasilitasi oleh pusat pengembangan kurikulum Depdiknas mengadakan berbagai uji coba

model kurikulum. Pada saat itu digulirkan pula gagasan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang sempat mendapat tanggapan pro kontra tetapi nama KBK menjadi sangat populer karena gemanya bukan hanya terjadi di jenjang sekolah melainkan hingga ke berbagai jenjang dan jenis pendidikan bahkan tingkat perguruan tinggi.

Pada tahun 2003 disahkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan sistem kurikulum di Indonesia. Salah satu implikasi dari ketentuan undang-undang tersebut ialah lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam PP tersebut dikemukakan bahwa standar nasional ialah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. menurut pasal 35 Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Oleh karena itu, adanya Standar Nasional Pendidikan telah berimplikasi terhadap sejumlah kebijakan bidang pendidikan yang lebih rendah.

Sementara itu dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa lingkup standar nasional meliputi:

1. Standar isi
2. Standar proses
3. Standar kompetensi lulusan
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana
6. Standar pengelolaan
7. Standar pembiayaan
8. Standar penilaian pendidikan

Dalam pasal 37 Undang-undang Sisdiknas dikemukakan bahwa mata pelajaran IPS merupakan muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Lebih lanjut dikemukakan pada bagian penjelasan UU Sisdiknas Pasal 37 bahwa bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan,

pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat.

Dengan adanya ketentuan undang-undang yang mewajibkan IPS sebagai mata pelajaran dalam sistem pendidikan di Indonesia telah menjadikan kedudukan IPS semakin jelas dan kokoh. Hal ini sekaligus menjawab berbagai keraguan dan kekhawatiran yang pernah dialami oleh akademisi dan praktisi IPS di berbagai lembaga pendidikan pada saat sebelum lahirnya undang-undang.

Pada saat itu, yakni sebelum lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2003 muncul sejumlah gagasan yang dilontarkan tentang perlunya perubahan nama sejumlah mata pelajaran sekolah dengan alasan jumlah mata pelajaran sekolah agar lebih ramping. Salah satu target perubahan tersebut ialah mata pelajaran IPS dan PPKn terutama di jenjang SD dan SMP. Nama yang ditawarkan antara lain mata pelajaran Pengetahuan Sosial (PS) yang isi di dalamnya memuat materi pendidikan kewarganegaraan dan masalah-masalah sosial kemasyarakatan, sementara mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan (PPKn) dihilangkan. Dalam gagasan lain, memunculkan nama Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial (PKPS) yang mengandung muatan sama dengan Pengetahuan Sosial di atas. Pada jenjang SMP dan SMA nama mata pelajaran PPKn diubah menjadi mata pelajaran Kewarganegaraan.

Perubahan nama mata pelajaran ini bahkan sudah diuji coba di berbagai daerah dan LPTK serta divalidasi oleh para guru dan ahli terkait. Hasilnya ialah dokumen Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan mata pelajaran yang ada disebut Pengetahuan Sosial, ada yang dinamakan mata pelajaran Kewarganegaraan, dan ada yang berlabel Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengetahuan Sosial untuk SD dan SMP bahkan telah dicetak, diedarkan dan dilaksanakan pada sejumlah sekolah padahal tidak pernah disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas RI).

Namun, setelah disahkan UU No. 20/2003 yang diakui oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang mengamanatkan perlu adanya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) maka pengembangan kurikulum mata pelajaran sekolah umumnya dan khususnya untuk mata

pelajaran IPS mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 tentang Standar Isi dan Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan panduan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).



BAB V

IPS Dan Ilmu-Ilmu Sosial

Menurut Sapriya (2017, p. 19-20), IPS merupakan nama mata pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program studi di perguruan tinggi yang identik dengan istilah *social studies* dalam kurikulum persekolahan di negara lain seperti Amerika Serikat. Nama IPS merupakan istilah hasil kesepakatan dari para ahli atau pakar di Indonesia tahun 1972 di Tawangmangu, Solo. IPS sebagai mata pelajaran di persekolahan, pertama kali digunakan dalam kurikulum 1975.

Namun, pengertian IPS di tingkat persekolahan itu sendiri mempunyai perbedaan makna, disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik khususnya antara IPS untuk Sekolah Dasar (SD) dengan IPS untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan IPS untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Pengertian IPS di persekolahan tersebut ada yang berarti nama mata pelajaran yang berdiri sendiri, ada yang berarti gabungan (*integrated*) dari sejumlah mata pelajaran atau disiplin ilmu, dan ada yang berarti program pengajaran. Perbedaan ini dapat pula diidentifikasi dari perbedaan pendekatan yang diterapkan pada masing-masing jenjang persekolahan tersebut.

Menurut Sapriya (2017, p. 20-23) dalam struktur disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu sosial maupun ilmu pendidikan, belum ditemukan adanya nama *social studies* ataupun pendidikan IPS sebagai subdisiplin ilmu. Hal ini mungkin terjadi karena *social studies* adalah sebuah program pendidikan dan bukan subdisiplin ilmu. Namun demikian, sampai saat ini peran ilmu-ilmu sosial tetap menjadi konten utama untuk *social studies* atau pendidikan IPS. Pembahasan pada bagian ini secara khusus difokuskan pada pengembangan program *social studies* terutama yang memberikan kontribusi pada pengembangan program *social studies*.

Ada beberapa pengertian ilmu-ilmu sosial yang dikemukakan oleh para ahli. Istilah ilmu sosial menurut Ralf Dahrendorf dalam Supardan (2011, p. 30). Ilmu sosial ialah suatu konsep yang ambisius untuk mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian pada aspek-aspek kemasyarakatan manusia. Bentuk tunggal ilmu sosial menunjukkan sebuah komunitas dan pendekatan yang saat ini hanya diklaim oleh beberapa orang saja, sedangkan bentuk jamaknya. Ilmu-ilmu sosial mungkin istilah tersebut merupakan bentuk yang lebih tepat. Ilmu-ilmu sosial mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, geografi sosial, politik, bahkan sejarah walaupun di satu sisi ia termasuk ilmu *humaniora*.

Numan Somantri mengidentifikasi sejumlah karakteristik dari ilmu-ilmu sosial sebagai berikut:

1. Berbagai batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan secara sistematis dan ilmiah
2. Batang tubuh disiplin itu berisikan sejumlah teori dan generalisasi yang handal dan kuat serta dapat diuji tingkat kebenarannya.
3. Batang tubuh disiplin ilmu-ilmu sosial ini disebut juga struktur disiplin ilmu, atau ada juga yang menyebutnya dengan fundamental ide.
4. Teori dan generalisasi dalam struktur itu disebut pula pengetahuan ilmiah yang dicapai lewat pendekatan konseptual dan *syntactis* yaitu lewat proses bertanya, berhipotesis, pengumpulan data (observasi dan eksperimen).
5. Setiap teori dan generalisasi ini terus dikembangkan, dikoreksi, dan diperbaiki untuk membantu dan menerangkan masa lalu,

masa kini dan masa depan serta membantu memecahkan masalah-masalah sosial melalui pikiran, sikap, dan tindakan terbaik.

Selain mengkaji perilaku manusia, disiplin ilmu-ilmu sosial memandang situasi peristiwa umat manusia dari perspektif yang agak berbeda dan unik. Karena ada perbedaan persepsi maka metodologi dan teknik penelitiannya pun berbeda. Setiap disiplin ilmu sosial memiliki konsep-konsep, generalisasi dan teori yang dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan desain maupun dalam pelaksanaan proses belajar mengajar IPS pada sekolah dasar dan menengah. Para ahli ilmu-ilmu sosial telah memerinci sekitar 8 disiplin ilmu sosial yang mendukung untuk pengembangan program *social studies* yang meliputi: antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, filsafat, ilmu politik, psikologi dan sosiologi. Pada hakikatnya, semua disiplin ilmu sosial tersebut memiliki objek kajian yang sama yakni manusia.

Kontribusi ilmu-ilmu sosial dalam pengembangan pendidikan IPS dalam kurikulum sekolah tidak diragukan lagi sebagaimana pentingnya teori dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial. Namun, perlu ada klarifikasi tentang teori, khususnya teori ilmu sosial dalam konteks pendidikan IPS. Bank mengakui bahwa sebenarnya banyak ahli yang menyarankan agar para pengembang kurikulum melakukan identifikasi terhadap teori-teori ilmu sosial yang dapat membantu para siswa dalam mengambil keputusan dan belajar konsep dan generalisasi.

Untuk mengenal lebih jauh tentang teori ilmu sosial, maka terlebih dahulu para mahasiswa dianjurkan untuk mengenal disiplin ilmu-ilmu sosial tersebut. Disiplin ilmu apa saja yang termasuk ilmu-ilmu sosial. Sedikitnya ada tujuh disiplin ilmu-ilmu sosial yang kita kenal selama ini menurut tradisi yang telah cukup lama khususnya yang berkembang sejak awal abad ke-20. Disiplin ilmu sosial tersebut dapat dijelaskan satu per satu sebagai berikut.

Menurut Astawa (2017, p. 23-25), ilmu sosial ialah bidang-bidang keilmuan yang mempelajari manusia di masyarakat dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Berikut akan dibahas beberapa Ilmu Sosial yang juga menjadi sumber IPS.

A. Ilmu Sosiologi

1. Pengertian Sosiologi

Istilah sosiologi sebagai cabang ilmu sosial dicetuskan pertama kali oleh ilmuwan Prancis, bernama August Comte tahun 1842 akan tetapi dalam catatan sejarah Emile Durkheim melanjutkan istilah tersebut dan menerapkannya menjadi sebuah ilmu disiplin ilmu. Kata sosiologi berasal dari dua kata dalam bahasa latin yaitu, *socius* yang artinya teman, keluarga, masyarakat dan *logos* yang berarti ilmu. Secara keseluruhan diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat.

Setiadi dan Kolip (2013, p. 1), menjelaskan bahwa kata sosiologi berasal dari kata latin "*socius*" artinya teman, dan dari bahasa Yunani "*logos*" artinya ilmu, diungkapkan pertama kali dalam buku yang berjudul "*Cours De Philosophie Positive*" karangan August Comte. Sampai saat ini tidak ada batasan yang pasti dan baku tentang apa yang dimaksud dengan sosiologi tersebut. Akan tetapi, hal ini bukan berarti para pembelajar sosiologi tidak memiliki kepastian dalam membatasi sosiologi. Sebab ada titik temu dari berbagai definisi sosiologi yang dikemukakan para ahli. Berikut definisi sosiologi menurut beberapa ahli dalam Ahmadi (1975, p. 9), sebagai berikut:

- 1) W.F. Ogburn dan M.F. Nimkoffe, dalam buku mereka berjudul "*A Handbook of Sociology*" memberikan definisi sosiologi sebagai studi secara ilmiah terhadap kehidupan sosial.
- 2) George A. Lundberg, dkk., dalam buku mereka "*sociology*" mengemukakan bahwa sosiologi mempelajari tingkah laku sosial dari orang-orang dan kelompok-kelompok.
- 3) Ginsberg dalam bukunya "*The Study of Society*", menjelaskan bahwa sosiologi ialah studi terhadap masyarakat, yaitu mempelajari antar aksi dan antar relasi manusia serta syarat dan akibatnya.
- 4) Max Weber dalam bukunya "*Wirtschaft und Gesellschaft*" memberi batasan sosiologi sebagai ilmu yang memberikan interpretasi dan pengertian-pengertian tentang perbuatan sosial.
- 5) Cuber dalam bukunya "*Sociologi A. Synopsi of Principles*" memberikan batasan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tentang hubungan timbal balik antara manusia.

- 6) Bierens De Haan dalam bukunya "*Sociologie, ontwikkeling en methode*" memberi batasan sosiologi sebagai ilmu tentang pergaulan hidup.
- 7) Kimball Young menjelaskan bahwa sosiologi ialah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia di dalam kelompok.
- 8) Sorokin dalam bukunya "*Culture and Personality*" mengemukakan bahwa sosiologi mempelajari gejala sosial kebudayaan dari sudut umum, mempelajari sifat esensial gejala tersebut, serta hubungan antara gejala itu yang amat banyak.
- 9) P.J. Bouman mengemukakan bahwa sosiologi ialah ilmu tentang kehidupan manusia dalam lingkungan kelompok.

Dari berbagai definisi tersebut dapat dilihat bahwa walaupun terdapat berbagai definisi yang berbeda satu dengan yang lain, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa sosiologi ialah salah satu cabang dari ilmu sosial yang mempelajari tentang pola-pola hubungan antara manusia dan manusia, baik secara individu, maupun secara kelompok yang berakibat pada lahirnya pola-pola sosial, di antaranya: nilai-nilai, norma-norma, dan kebiasaan yang dianut oleh manusia di dalam kelompok tersebut.

2. Objek Studi Sosiologi

Priyono (2006, p. 6) menjelaskan bahwa objek studi sosiologi ialah masyarakat yaitu hubungan antar manusia dan proses yang timbul sebagai konsekuensi dari hubungan antar manusia tersebut. Hal-hal yang tercakup dalam masyarakat sebagai objek studi sosiologi adalah sebagai berikut:

- 1) Sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam waktu yang cukup lama, berkesinambungan serta melakukan interaksi dengan keinginan-keinginan dan perasaannya sehingga timbul sistem komunikasi dan peraturan dalam mengatur hubungan antarmanusia tadi, mempunyai identitas dan tujuan bersama.
- 2) Merupakan satu kesatuan.
- 3) Mempunyai sistem hidup bersama yang melahirkan kebudayaan, nilai dan norma yang berlaku dan mengikat setiap anggota masyarakat.

3. Ruang Lingkup Sosiologi

Sosiologi merupakan disiplin ilmu yang memiliki cakupan luas dan banyak cabang yang dipersatukan. Menurut Supardan (2011, p. 78) secara tematis ruang lingkup sosiologi dapat dibedakan menjadi beberapa sub disiplin ilmu sosiologi, seperti sosiologi pedesaan, sosiologi industri, sosiologi perkotaan, sosiologi medis, sosiologi wanita, sosiologi militer, sosiologi keluarga, sosiologi pendidikan, dan sosiologi seni. Berikut penjelasan ruang lingkup sosiologi tersebut.

4. Tujuan dan Manfaat Sosiologi

Sosiologi merupakan ilmu murni atau "*pure sciene*" bukan ilmu terapan "*applied sciene*". Ini berarti ilmu yang dimaksudkan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu secara abstrak untuk meningkatkan kualitasnya. Dalam hal ini, tujuan sosiologi adalah untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang masyarakat. Selain itu, sosiologi juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap ciri-ciri dan sifat-sifat masyarakat serta meningkatkan daya adaptasi diri dengan lingkungan hidupnya, terutama lingkungan sosial-budayanya. Caranya adalah dengan mengembangkan pengetahuan yang objektif mengenai gejala-gejala masyarakat yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial.

Berpijak pada apa yang menjadi tujuan sosiologi tersebut, dapat dikemukakan nilai guna sosiologi, sebagai berikut:

- 1) Dapat dijadikan alat dan sarana untuk memahami masyarakat tertentu, di antaranya: petani, pedagang, buruh, pegawai, komunitas keagamaan, militer, dan sebagainya.
- 2) Sebagai alat untuk memahami struktur masyarakat, pola-pola interaksi, serta stratifikasi sosial.
- 3) Hasil studi sosiologi terhadap kondisi masyarakat dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan suatu kebijakan, baik dari pemerintah, perusahaan, badan dunia, atau yang lainnya.
- 4) Hasil kajian sosiologi dapat dijadikan pertimbangan untuk memecahkan masalah-masalah sosial.
- 5) Data tentang masyarakat dapat membantu kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi hasil-hasilnya.

B. Ilmu Antropologi

1. Pengertian Antropologi

Manusia merupakan makhluk yang memiliki kebudayaan dan peradaban, hal ini dapat dibuktikan sejak zaman manusia purba sampai manusia modern. Keunikan dalam hal peradaban ini tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, sehingga para ilmuwan tertarik untuk mempelajari tentang manusia untuk itu ilmu yang mempelajari tentang manusia disebut antropologi. Kata antropologi berasal dari bahasa Yunani yakni *anthropos* yang berarti manusia atau orang, dan *logos* yang berarti ilmu.

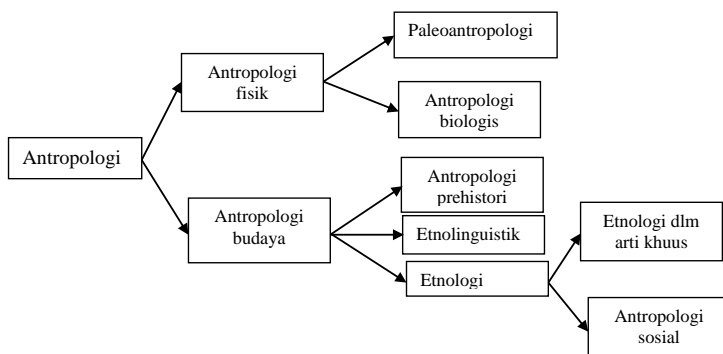
Menurut Astawa (2017, p. 132) secara harfiah antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *anthropos* berarti manusia, dan *logos* artinya ilmu. Antropologi berarti ilmu yang mengkaji manusia. Antropologi merupakan disiplin ilmu yang luas, dengan menggabungkan humaniora, ilmu sosial, dan ilmu alam untuk menjelaskan apa itu manusia dan artinya menjadi manusia. Jadi, antropologi merupakan ilmu yang mengkaji manusia untuk memperoleh pengertian atau pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, masyarakat dan kebudayaannya.

2. Objek Studi Antropologi

Menurut Astawa (2017, p. 136), objek studi antropologi ialah manusia di dalam masyarakat kebudayaan, suku bangsa, dan perilakunya.

3. Ruang Lingkup Antropologi

Menurut Koendjaraningrat dalam Maryani dan Farida (1997, p. 2-4) bahwa antropologi dapat dibagi menjadi 2, yaitu antropologi fisik dan budaya. Secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut.



Wiranata (2001, p. 3) juga mengemukakan bahwa antropologi dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Antropologi fisik, yaitu menyelidiki manusia sebagai makhluk biologis, mempelajari manusia dari sudut jasmaninya dalam arti yang seluas-luasnya. Dalam hal ini, yang diselidiki ialah asal usul manusia, perkembangan evolusi organik, struktur tubuh dan kelompok-kelompok manusia yang disebut ras. Adapun cabang-cabang antropologi fisik ialah:
 - a) Palaentologi primat, yaitu ilmu yang mempelajari deskripsi dari *varietas-varietas manusia yang tidak ada lagi di dunia*.
 - b) Evolusi manusia, yaitu ilmu yang mempelajari perkembangan *type-type manusia*, dimulai dari makhluk-makhluk bukan manusia.
 - c) Antropometri, yaitu studi tentang teknik *pengukuran tubuh manusia*.
 - d) Somatologi yaitu studi tentang *varietas manusia yang masih* hidup dan tentang perbedaan sex dari variasi perseorangan.
 - e) Antropologi rasial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang *penggolongan manusia* dalam kelompok-kelompok ras, sejarah ras manusia dan hal-hal tentang pencampuran ras.
- 2) Antropologi budaya yaitu: menyelidiki kebudayaan manusia pada umumnya dan kebudayaan-kebudayaan dari berbagai bangsa di dunia (menyelidiki seluruh cara hidup manusia). Adapun cabang-cabang antropologi budaya yaitu:
 - a) Prehistrory: mempelajari sejarah perkembangan persebaran kebudayaan-kebudayan manusia di muka bumi dalam zaman manusia belum mengenal huruf.
 - b) Etnolinguistik: mempelajari kebudayaan manusia di dalam kehidupan masyarakat, yang dikumpulkan sebanyak-banyaknya suku bangsa yang tersebar dari ucapan-ucapan dan perbendaharaan kata.

c) Etnologi: mempelajari tentang kebudayaan manusia yang di muka bumi.

4. Tujuan dan Kegunaan Antropologi

Menurut Astawa (2017, p. 141), sebagai ilmu yang membahas tentang manusia, antropologi pada hakikatnya mempunyai tiga tujuan utama, yaitu:

- 1) Mendeskripsikan selengkap mungkin tata ara kehidupankelompok manusia dariberbagai sudut belahan bumi pada setiap periode dan karakter fisik manusia yang hidup padakelompok itu.
- 2) Memahami manusiasebagai kelompok tertentu secarakeseluruhan
- 3) Menemukan prinsip-prinsip umum tentang gaya hidup manusia serta bagaimana gaya hidup itu terbentuk.

Berpijak pada tujuan dalam mempelajari antropologi tersebut, dapat dikemukakan paling tidak terdapat empat nilai guna dalam mempelajari antropologi, yaitu:

- 1) Dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat (suku bangsa).
- 2) Dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus dilakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang disandang.
- 3) Akan memperluas wawasan terhadap tata pergaulan umat manusia diseluruh dunia yang mempunyai kekhususan-kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi.
- 4) Dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kecakapan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, baik yang menyenangkan serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakatnya.

C. Ilmu Ekonomi

1. Pengertian Ekonomi

Kajian konsep dasar Ilmu ekonomi sering kali dikenal dengan bapak ekonomi yakni Adam Smith, bahwa Adam Smith mendefinisikan ilmu ekonomi merupakan sebuah penyelidikan kedalam sifat dan penyebab kekayaan bangsa-bangsa. Secara bahasa ekonomi berasal dari bahasa Yunani yakni *oikonamos* atau *oikonomia* yang berarti manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Menurut Supardan (2011 p. 367) istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikosnamos* atau *oikonomia* yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Namun, sejak perolehan maupun penggunaan kekayaan sumber daya secara fundamental perlu diadakan efisiensi, termasuk pekerja dan produksinya maka dalam bahasa modern istilah ekonomi tersebut menunjuk terhadap prinsip usaha maupun metode untuk mencapai tujuan dengan alat-alat sesedikit mungkin.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia dan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia guna mencapai kemakmuran.

2. Objek Studi Ekonomi

Menurut Astawa (2017, p. 148), objek kajian ilmu ekonomi ialah keseluruhan kegiatan perekonomian manusia. Keluasan kajian tersebut menyebabkan ruang lingkup dalam bidang ekonomi dikenal menjadi dua yaitu bersifat mikro dan bersifat makro.

3. Ruang lingkup ekonomi

Menurut Supardan (2011, p. 366), ditinjau dari ruang lingkup atau cakupannya, ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Makroekonomi

Pada masa sebelumnya, sasaran kebijakan makroekonomi adalah kesempatan kerja *full employment* (kondisi di mana seluruh sumber daya, khususnya tenaga kerja dapat terserap sepenuhnya) dan stabilitas harga. Stabilitas *output* dari tahun ke tahun untuk menghindari ledakan pertumbuhan atau resesi yang sangat parah merupakan sasaran tambahan. Akan tetapi,

tingkat pertumbuhan output pada jangka waktu yang lebih panjang, tergantung pada banyak faktor seperti teknologi, pelatihan, dan insentif yang cenderung termasuk dalam misi penawaran atau kebijakan mikroekonomi. Dalam perekonomian yang terbuka, baik posisi neraca pembayaran maupun pola tingkat pertukaran di pasar pertukaran valuta asing, dapat dipandang sebagai suatu tujuan yang terpisah dari kebijakan makroekonomi atau sebagai suatu halangan terhadap operasional makroekonomi.

b) Mikroekonomi

Mikroekonomi ialah studi mengenai unit-unit pengambilan keputusan individual dalam perekonomian, seperti rumah tangga, pekerja, dan perusahaan yang secara umum dikenal dengan sebutan mikroekonomi. Sebagai contoh, ekonomi mikro meneliti determinasi harga terhadap beras, harga relatif beras dan baja, atau *employment* dalam industri baja sementara makro ekonomi berurusan dengan determinasi tingkat *employment* dalam suatu perekonomian khusus, atau dengan tingkat harga dari seluruh komoditas. Kendati demikian, perbedaan antara dua bidang analisis ekonomi ini berguna untuk berbagai tujuan. Terdapat enam topik yang sering dipresentasikan dalam mikro ekonomi yaitu teori perilaku konsumen, teori pertukaran, teori produksi dan biaya teori perusahaan, teori distribusi, dan teori ekonomi kesejahteraan. Dewasa ini ilmu ekonomi telah berkembang jauh melebihi ilmu-ilmu sosial lainnya yang terbagi-bagi dalam beberapa bidang kajian, seperti ekonomi lingkungan, ekonomi evolusioner, ekonomi eksperimental, ekonomi kesehatan, ekonomi institusional, ekonomi matematik, ekonomi sumber daya alam, ekonomi pertahanan, ekonomi sisi penawaran, ekonomi kesejahteraan, ekonomi dualistik, ekonomi informal, ekonomi campuran, ekonomi pertanian, ekonomi tingkah laku ekonomi, dan ekonomi pembangunan.

4. Manfaat Mempelajari Ekonomi

Case dan Fair dalam Astawa (2017, p. 151), mengemukakan pandangannya tentang beberapa manfaat belajar ilmu ekonomi, antara lain:

a) Membantu Cara Berpikir yang Tepat dalam Pengambilan Keputusan

Pikiran adalah harta yang sangat berharga dalam diri manusia. Manusia dengan pikirannya mampu menganalisis, melakukan penilaian terhadap benar-salah serta baik-buruk, untuk kemudian menentukan pilihan terhadapnya. Kemampuan ini pula yang menjadikan manusia dapat mempertahankan keberadaannya untuk ada pada puncak ekosistem di bumi ini.

Seiring perkembangan zaman, manusia juga terus-menerus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Berbagai metode dan teknik berpikir dalam ilmu ekonomi akan semakin meningkatkan kemampuan berpikir dan mengambil keputusan dari setiap perbuatan yang dilakukan.

b) Membantu Memahami Masyarakat

Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial. Berinteraksi adalah hal yang tidak bisa kita hentikan. Sedangkan menurut ilmu ekonomi, interaksi manusia terjadi lewat pertukaran atau yang disebut dengan pasar.

Diajarkan dalam sejarah-sejarah ekonomi, bahwa manusia berupaya mengatasi kelangkaan melalui pertukaran tersebut. Peradaban pun kian berkembang dan sistem kemasyarakatan juga semakin maju. Melalui ilmu ekonomi, kita juga bisa belajar banyak dan memahami berbagai peristiwa penting dalam sejarah perekonomian dunia, seperti revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di Perancis, serta peristiwa-peristiwa bersejarah penting lainnya.

c) Membantu Pemahaman Terhadap Masalah-Masalah Global

Pada setiap tingkat hidup selalu ada kelangkaan yang terjadi dan harus dihadapi, mulai dari individu, keluarga, masyarakat desa, kota, negara bahkan dunia. Pada tingkat internasional, jarang sekali terjadi interaksi ekonomi antarindividu yang secara langsung demi kepentingan pribadi. Individu yang berinteraksi lebih sering mewakili kepentingan-kepentingan kelompoknya (negara maupun perusahaan).

Apa yang dilakukan oleh mereka walaupun terlihat baik bagi kelompok atau negara lain, namun sebenarnya lebih kepada pertimbangan kepentingan kelompok atau negara mereka sendiri.

Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita akan mampu memahami lebih dalam tentang berbagai kerja sama antarnegara, dan juga kenapa krisis ekonomi bisa terjadi pada suatu negara. Seperti contoh, ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi di tahun 1998, banyak negara-negara maju dan juga lembaga keuangan internasional yang mau memberikan bantuannya kepada negara kita.

d) Membangun Masyarakat yang Lebih Demokrasi

Harapan atau cita-cita membentuk sebuah masyarakat yang demokrasi bukanlah hanya kepentingan para politisi saja. Para ekonom pun juga memiliki cita-cita yang sama. Demokrasi di pandang dari segi ekonomi sebagai suatu hal yang penting, karena dengan adanya demokrasi maka alokasi sumber daya dapat lebih optimal karena mencerminkan aspirasi dari sebagian besar masyarakat.

Seperti diketahui, para calon pemimpin tentunya juga harus menjabarkan bagaimana mereka akan menjalankan program-program ekonominya di saat masa kampanye berlangsung. Dari situ bisa dilihat pula bahwa ekonomi dan politik adalah dua hal penting yang saling berkaitan satu sama lain sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan roda pemerintahan sebuah negara.

D. Ilmu Geografi

1. Pengertian Geografi

Istilah ekonomi pertama kali muncul pada abad ke-1 di bawah pengaruh Erasthenes. Secara bahasa Geografi berasal dari kata *Geo* dan *Graphain* yang berarti bumi dan tulisan, untuk itu ilmu geografi membahas tentang ilmu yang mempelajari bumi. Menurut Supardan (2011, p. 227), geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *geo* yang berarti bumi dan *graphain* yang berarti lukisan atau tulisan. Menurut pengertian yang dikemukakan oleh Eratosthenes, *geographika* berarti tulisan tentang bumi. Pengertian bumi dalam geografi tersebut, tidak hanya berkenaan dengan fisik alamiah bumi saja, melainkan juga meliputi segala gejala dan proses alamnya, maupun gejala dan proses kehidupannya. Oleh karena itu, dalam hal gejala dan proses kehidupan

melibatkan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia sebagai penghuni bumi tersebut.

a. Objek Studi Geografi

Menurut Astawa (2011, p. 159-161), Menurut Ikatan Geografi Indonesia (IGI), secara umum dapat dikemukakan bahwa objek studi geografi ada dua, yaitu:

1) Objek Material

Objek material geografi ialah fenomena geosfer, yaitu meliputi segala sesuatu yang ada di muka bumi berupa semua benda baik benda mati maupun benda hidup, beserta lingkungannya. Geosfer terdiri dari lima lapisan sebagai berikut:

- a) Atmosfer atau udara yang menyelubungi bumi
- b) Litosfer atau kulit bumi
- c) Hidrosfer (air)
- d) Biosfer (hewan dan tumbuhan)
- e) Anthrosfer (manusia)

2) Objek Formal

Objek formal ialah cara pandang, cara berfikir, atau analisis terhadap segi materialnya. Objek formal inilah yang membedakan geografi dengan lainnya. Cara pandang atau pendekatan ini yang digunakan geografi untuk mengkaji objek materialnya. Objek formal atau pendekatan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Analisis keruangan
- 2) Analisis Ekologi atau kelingkungan
- 3) Analisis kompleks wilayah (kewilayahan)

3) Ruang Lingkup Geografi

Menurut Supardan (2011, p. 227), geografi secara makro dapat dikelompokkan dalam dua subdisiplin, yaitu: Geografi fisik dan Geografi manusia.

4) Manfaat Mempelajari Geografi

Setiap lapisan yang dipelajari dalam eografi baik atmosfer, hidrosfer, biosfer, litosfer maupun antrhoposfer selalu mengandung hakikat nilai atau manfaat. Hal ini berarti bahwa keterlibatan georafi dengan aspek-aspek bidang

kajiannya menjadikan cabang ilmu ini berfungsi tidak saja untuk menjelaskan, namun juga meramal, dan mengontrol yang diaplikasikan ke dalam perencanaan dan pengembangan wilayah sebagai geografi terapan.

Berkenaan dengan itu, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa nilai guna geografi menurut Alfandi dalam Astawa (2017, p. 161), mencakup tiga hal, yaitu:

- a) Subjektivisme, yaitu kegunaannya bagi manusia. Contoh: jika seorang geograf ingin menjadikan suatu wilayah tertentu sebaia daerah pemukiman, maka terlebih dahulu melakukan pengkajian tentang jenis tanah, morfologi, akseibilitas, kondisi air tanah dan kondisi sosial pada suatu wilayah tertentu.
- b) Objektivisme logis, yaitu yang bersifat empiris baik melalui hasil percobaan, pengukuran. atau yang lainnya. Contoh: melihat letak geografis Indonesia yang dilalui oleh jalur sirkum mediteran, seberapa tinggi tingkat kerawanan bencana alam letusan gunung api di indonesia, dan lain-lain.
- c) Nilai etika dan estetika yang berkenaan dengan interaksi manusia dengan lingkungannya. Misalnya jika tidak beretika dalam menggunakan wilayah maka bisa saja terjadi bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain.

E. Ilmu Sejarah

1. Pengertian Sejarah

Kajian Ilmu sejarah sangat menjadi sebuah kajian jejak dan sejarah yang terjadi memuat kehidupan manusia dimasa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Menurut Supardan (2011: 287), istilah sejarah berasal dari bahasa Arab yakni *syajaratun* (dibaca syajarah), yang artinya pohon kayu. Pengertian pohon kayu disini adalah adanya suatu kejadian, perkembangan atau pertumbuhan tentang suatu hal (peristiwa) dalam suatu kesinambungan (kontinuitas). Hostory yang bersumber dari bahasa Yunani kuno historia yang berarti belajar dengan cara bertanya-tanya. Kata historia diartikan sebagai telaahan mengenai gejala-gejala (terutama hal ihwal manusia) dalam urutan kronologis.

Setelah menelusuri arti sejarah yang dikaitkan dengan arti syajarah dan dihubungkan dengan kata history, bersumber dari kata historia dapat disimpulkan bahwa sejarah ialah cerita atau kejadian yang benar-benar telah terjadi pada masa lampau.

2. Objek Studi Sejarah

Menurut Astawa (2017: 170), secara keilmuan sejarah memiliki dua objek studi yaitu objek formal dan objek material. Objek material yang merupakan fokus kajian sejarah ialah manusia. Sementara, objek formal digunakan untuk mengkaji objek materialnya adalah aktivitas manusia yang pernah terjadi dalam suatu rentang waktu di masa lampau.

3. Ruang Lingkup Sejarah

Dilihat dari ruang lingkungannya, terutama pembagian sejarah secara tematik, sejarah memiliki cakupan yang sangat luas. Sjamsuddin dan Burke dalam Supardan (2011, p. 293) mengelompokkan dalam belasan jenis sejarah yaitu sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan, sejarah demografi, sejarah politik, sejarah kebudayaan rakyat, sejarah intelektual, sejarah keluarga, sejarah etnis, sejarah psikologi, psikologi histori, sejarah pendidikan dan sejarah medis.

4. Manfaat Mempelajari Sejarah

Menurut Kartodirdjo dan Kontowiyoyo dalam Astawa (2017, p. 175-178), pada hakikatnya sejarah memiliki dua nilai guna yang menunjukkan eksistensinya sebagai ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan manusia, yaitu nilai instrinsik dan ekstrinsik.

1) Nilai intrinsik

Setidaknya ada empat guna sejarah intrinsik, yaitu:

a) Sejarah sebagai ilmu

Sejarah adalah ilmu yang terbuka. Keterbukaan itu membuat siapapun dapat mengaku sebagai sejarawan secara sah (tidak seperti profesi lain seperti dokter, guru, wartawan, dan lain-lain), asal hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu dapat berkembang dengan cara: (1) perkembangan dalam filsafat; (2) perkembangan dalam teori sejarah; (3) perkembangan dalam ilmu lain; (4) perkembangan dalam metode sejarah.

b) Sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau

Sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Selain mitos, sejarah adalah cara untuk mengetahui masa lampau. Ada setidaknya dua sikap terhadap sejarah setelah mengetahui masa lampainya, yaitu (1) melestarikan; (2) menolak. Melestarikan karena menganggap masa lampau itu penuh makna.

c) Sejarah sebagai pernyataan pendapat

Banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat. Sebagai contoh yang berkembang di Amerika ada dua aliran yang sama-sama menggunakan sejarah: (1) konsensus; (2) konflik. Aliran konsensus berpendapat bahwa dalam masyarakat selalu ada konsensus, dan para sejarawan selalu bersikap kompromistis. Sebaliknya, aliran konflik menekankan seolah-olah dalam masyarakat selalu terjadi pertentangan dan menganjurkan supaya bersikap kritis dalam berpikir tentang sejarah. Kartodirdjo mengemukakan bahwa secara instrinsik sejarah mempunyai kegunaan genetis dan kegunaan didaktik. Pada kegunaan genetis, nilai-nilai luhur yang terdapat pada setiap peristiwa masa lampau perlu diwariskan secara turun-menurun agar dapat membentuk watak manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sedangkan sebagai kegunaan didaktik atau pendidikan nilai-nilai luhur yang terdapat pada peristiwa masa lampau perlu diwariskan kepada generasi muda agar dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Memperhatikan kegunaan tersebut, secara instrinsik dapat dikemukakan bahwa sejarah memiliki kegunaan edukatif atau pendidikan dan kegunaan instruktif atau memberikan pengajaran.

2) Nilai Ekstrinsik

a) Kegunaan Inspiratif

Sejarah berguna untuk memberikan inspirasi atau pemikiran. Berbagai peristiwa pada masa lampau akan memberikan inspirasi pada pembentukan moral dan

karakter bangsa. Misalnya semangat 45 yang memiliki nilai-nilai persatuan dan kesatuan, rela berjuang, berkorban tanpa pamrih, dan cinta tanah air. Melalui sejarah, generasi muda khususnya pelajar dan mahasiswa dapat memiliki inspirasi dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa melalui bidang pendidikan dengan cara menyarap ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, sejarah dapat menginspirasi munculnya ide-ide serta kreatifitas generasi muda untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan bangsa.

b) Kegunaan Rekreatif

Situs-situs sejarah dan prasejarah, di samping sebagai kekayaan ilmiah juga dapat dijadikan tempat pariwisata yang akan membawa dampak bagi perekonomian daerah maupun nasional. Melalui jejak-jejak sejarah pada situs-situs tersebut orang akan diajak kembali berekreasi menikmati keindahan masa lampau. Fungsi rekreasi sejarah dalam hal ini dapat dinyatakan berperan sebagai pemandu atau memberikan petunjuk-petunjuk penting terhadap peninggalan sejarah. Sejarah memberikan informasi secara lengkap peninggalan-peninggalan sebagai bukti bahwa pada masa lampau manusia telah mengembangkan kebudayaannya dari berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, peristiwa masa lampau harus disusun menjadi kisah sejarah yang menarik serta dapat menimbulkan minat orang untuk membacanya.

F. Ilmu Politik

Objek kajian ilmu politik diserap dari istilah Politics (Inggris) yang pertama kali diperkenalkan oleh Aristoteles. Kajian politik membahas mengenai teori dan praktek politik serta gambaran dan analisis mengenai sistem politik.

a. Pengertian

Ilmu politik senantiasa berkenaan dengan masalah:

- 1) Kekuasaan, sumber kekuasaan, pengaruh, pembuat dan pelaksanaan kebijakan

- 2) Kewenangan dan kekuasaan berdasarkan legitimasi
 - 3) Konflik dan konsensus
 - 4) Pengambilan keputusan dan cara mendistribusikan kekuasaan
- b. Objek Ilmu Politik

Sebagai suatu disiplin ilmu, maka ontologi harus memiliki objek kajian. Adapun objek ilmu politik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Ontologi ilmu politik	
Objek formal	Objek materil
Kekuasaan	Negara

Menurut Miriam Budiardjo bahwa ontologi ilmu politik ada lima, yaitu:

- 1) **Negara** yaitu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya
 - 2) **Kekuasaan** yaitu kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku
 - 3) **Pengambilan keputusan** yaitu hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai.
 - 4) **Kebijakan umum** yaitu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.
 - 5) **Pembagian** yaitu pembagian dan penjabatan nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai dapat bersifat abstrak dan dapat bersifat konkret.
- c. Ruang Lingkup Ilmu Politik
- 1) Bidang Teori Politik
 - a) Teori Politik

Generalisasi dari fenomena yang bersifat politik, bahasan dan renungan atas: tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan itu, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu. Teori politik dapat dibagi menjadi 2.

Pertama, teori-teori yang mempunyai dasar moral atau yang bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk berperilaku, yang terdiri dari: Filsafat politik, Teori politik sistematis, Ideologi politik. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik yang tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. *Kedua*, teori-teori ini dapat dinamakan non volutional (*value free*). Biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan).

- b) Sejarah perkembangan ide-ide politik, yang dapat dibagi menjadi tiga zaman yaitu:
- (1) Tradisi klasik (Plato dan Aristoteles),
 - (2) Tradisi abad pertengahan (Santo Austinus, Santo Thomas Aquinas, Marthin Luther),
 - (3) Tradisi pencerahan (Nicholo Machiavelli, Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu, Jean Jacques Roseau),
 - (4) Tradisi modren (George Wilhem Friedeich Hegel, Karl Henrich Marx, John Stuart Mill).

2) Bidang Lembaga-Lembaga Politik

a) Undang-Undang Dasar

Suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan.

b) Pemerintahan Nasional

Suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari organ-organ pemegang kekuasaan di dalam negara dan saling melakukan hubungan fungsional di antara organ-organ tersebut baik secara vertikal maupun horisontal untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.

c) Pemerintahan Lokal atau Daerah

Daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

d) Fungsi Ekonomi dan Sosial Dari Pemerintah

(1) Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi

Fungsi stabilitas Adalah fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilasa ekonomi, sosial, politik, hukum, pertahanan dan keamanan, fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon, fungsi distribusi Adalah fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

(2) Fungsi Pemerintah di Bidang Sosial

Fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan.

(3) Perbandingan Lembaga-Lembaga Politik

Membandingkan lembaga-lembaga politik baik sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, legislatif, struktur pemerintahan, otoritas sentral, system peradilan, pemerintahan lokal, pelayanan sipil serta angkatan bersenjata. Bidang ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta membandingkan perbedaan atau persamaan yang ada antar lembaga yang dibandingkan.

3) Bidang Kepartaian, Golongan, dan Pendapat Umum

a) Partai-Partai Politik

Kelompok yang terorganisasi, ditandai dengan adanya visi, misi, tujuan, platform, program dan agenda, mengikuti pemilihan umum untuk meraih kekuasaan atau jabatan legislatif dan eksekutif.

b) Golongan-Golongan dan Asosiasi

c) Partisipasi Warga Negara dalam Pemerintah dan Administrasi Ada tiga tradisi partisipasi: Partisipasi politik, Partisipasi sosial, Partisipasi warga.

d) Pendapat Umum

Suatu persepsi atau suatu pendapat yang dihasilkan oleh sekelompok manusia terhadap suatu kejadian yang terjadi dan mungkin akan terjadi. Atau opini publik adalah sebagai

suatu kesatuan pernyataan tentang suatu hal yang bersifat kontroversial.

4) Bidang hubungan internasional

a) Politik internasional

Bentuk perilaku yang diwujudkan suatu negara untuk memperjuangkan kepentingannya dalam berhubungan dengan negara lain. Bidang ini berkaitan dengan pengambilan keputusan.

b) Organisasi-Organisasi dan Administrasi Internasional

Suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional.

c) Hukum Internasional

Sebuah badan yang mempunyai asa-asa yang diterima secara umum dan aturan-aturan yang mengatur dan mengawasi perilaku negara, individu dan organisasi-organisasi internasional.

d. Manfaat Ilmu Politik

- 1) Memberi jalan yang lebih baik dalam hal negosiasi kepentingan antar kelompok dalam masyarakat.
- 2) Membahagiakan hidup manusia yang tinggal dalam wilayah yang sama.
- 3) Tujuan politik ialah tindakan politik. Untuk mencapainya diperlukan pembelajaran untuk memperbesar kepekaan pembelajar sehingga ia dapat bertindak baik secara politik. Misalnya menelaah kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh para penguasa dan berusaha untuk mengurangi ketidaktahuan diri mereka yang dikuasai.
- 4) Politik sebagai ilmu menaruh perhatian pada dalil-dalil, keabsahan, percobaan, hukum, keragaman, dan pembentukan asas-asas universal.

G. Ilmu Psikologi Sosial

1. Pengertian Psikologi Sosial

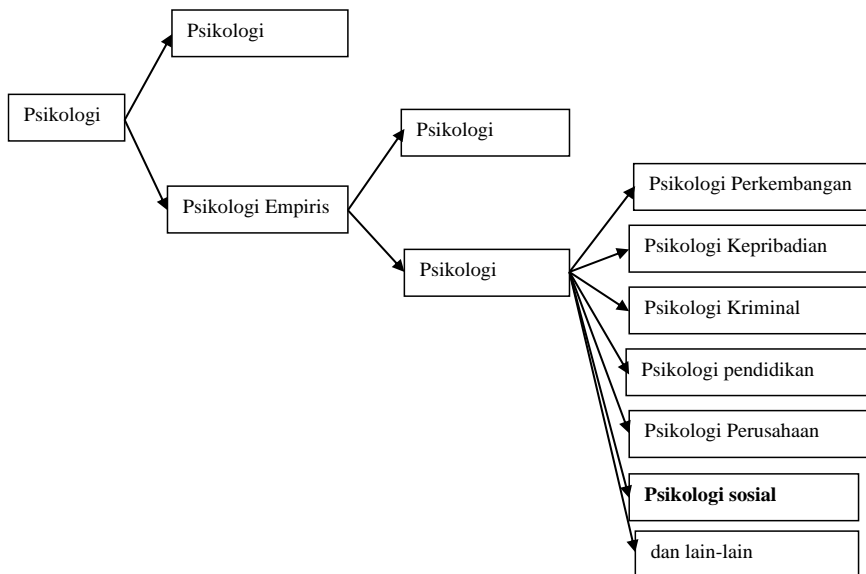
Persoalan Psikologi dalam kehidupan manusia khususnya dalam dunia pendidikan maka faktor ini mendorong terus dikaji dan dipelajari oleh orang banyak. Ilmu psikologi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani *psyche* yang berarti jiwa dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Psikologi diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan proses mental baik norma maupun abnormal dan pengaruhnya terhadap perilaku yakni gejala dan kejiwaan manusia.

Menurut Shaw dan Costanzo dalam Soeparno dan Sandra (2011, p. 16), psikologi sosial sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku individual sebagai fungsi stimulus-stimulus sosial. Senada dengan pendapat ini, Sherif dan Muzfer (2011, p. 17), mendefinisikan psikologi sosial sebagai ilmu tentang pengalaman dan perilaku individu dalam kaitannya dengan situasi stimulus sosial.

2. Kedudukan, objek dan ruang lingkup psikologi sosial

Psikologi sosial memiliki ketertarikan dengan cakupan yang luas. Walaupun demikian, fokus utama psikologi sosial yakni memahami bagaimana dan mengapa individu berperilaku, berpikir, dan memiliki perasaan tertentu dalam konteks situasi sosial. Situasi sosial yang dimaksud ialah kehadiran orang lain secara nyata maupun secara imajinatif.

Menurut Mahmudah (2011, p. 9), dilihat dari segi perkembangannya, psikologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) psikologi yang bersifat kefilosofan, dan (2) psikologi yang bersifat empirik, yaitu psikologi yang berdasarkan atas pengalaman-pengalaman. Dalam domain psikologi inilah muncul dua model psikologi, yaitu: *Pertama*, Psikologi umum, yang menyelidiki dan mempelajari aktivitas-aktivitas kejiwaan atau psikis manusia pada umumnya, baik yang terdapat pada manusia dewasa, normal, maupun yang berbudaya; di samping itu juga memandang manusia terlepas dari hubungannya dengan manusia yang lainnya. Psikologi umum mencari dalil-dalil yang bersifat umum dari kegiatan psikis yang kemudian menjadi teori-teori psikologi. *Kedua*, Psikologi khusus, yaitu psikologi yang menyelidiki dan mempelajari segi-segi kekhususan dari hal-hal yang bersifat umum dipelajari dalam lapangan psikologi.



Menurut Gerungan (1988, p. 29), Pokok-pokok yang menjadi materi psikologi sosial ialah mengenai kehidupan manusia. Maka, objek material psikologi sosial ialah fakta-fakta dan kejadian-kejadian dalam kehidupan sosial manusia di masyarakatnya, atau dengan kata lain gejala-gejala sosial. Sedangkan objek formal psikologi sosial ialah pengalaman dan tingkah laku individu yang dipengaruhi atau ditimbulkan oleh situasi-situasi sosial. Hal ini berkaitan dengan bagaimana kita mengamati orang lain, bagaimana kita bereaksi terhadap orang lain, dan secara umum bagaimana kita dipengaruhi oleh situasi sosial.

3. Tujuan Psikologi Sosial

Menurut Hanurawan (2010, p. 2) psikologi sosial sebagai salah satu cabang psikologi yang paling penting memiliki beberapa tujuan keilmuan. Beberapa tujuan keilmuan dari psikologi sosial itu adalah untuk memahami, menjelaskan, meramalkan, memodifikasi, dan memecahkan masalah terkait dengan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku individu yang dipengaruhi kehadiran orang lain.

Menurut Sarwono (2008, p. 4) menjelaskan bahwa psikologi sosial bertujuan untuk mengerti suatu gejala atau fenomena. Dengan mengerti suatu fenomena, kita dapat membuat peramalan-peramalan tentang

kapan akan terjadinya fenomena tersebut dan bagaimana hal itu akan terjadi. Selanjutnya, dengan pengertian dan kemampuan peramalam itu, kita dapat mengendalikan fenomena itu sampai batas-batas tertentu.



BAB VI

Hubungan Antara Ilmu Sosial Dan IPS (Sumber Dan Materi IPS)

A. Sumber dan Materi IPS

Materi IPS yang dapat dipelajari dan menjadi bahan pelajaran, tidak hanya kehidupan nyata sehari-hari tetapi juga meliputi cerita-cerita novel, kisah tokoh-tokoh terkenal yang dapat dibaca oleh peserta didik, di samping itu bahan bacaan seperti koran, majalah, jurnal, makalah merupakan sumber materi IPS sekaligus sumber pelajaran IPS yang berharga serta bernilai dalam membina kepribadian peserta didik.

Selanjutnya berita dan pemberitaan baik berkenaan dengan kehidupan sosial setempat maupun pada tingkat regional, nasional dan dunia merupakan bahan pengetahuan. Sumber pemberitaan ini dapat kita lihat pada surat kabar, radio dan televisi. Peristiwa kehidupan sosial di tempat lain yang secara langsung dapat kita saksikan dan diamati bahkan dianalisis kesemuanya ini merupakan sumber materi pembelajaran IPS. Selain itu, juga dapat dipelajari melalui dokumen, peninggalan-peninggalan sejarah berupa fosil, candi, bangunan bersejarah, maupun museum, banyak hal bermakna yang dapat kita pelajari, khususnya mengenai peristiwa-peristiwa masa lalu yang

bernilai positif dan membawa kebaikan maupun yang bernilai negatif yang membawa kehancuran bagi kehidupan manusia di masa lampau. Dengan kata lain, segala hal yang mampu menyumbangkan bahan pembelajaran IPS dapat diterapkan sebagai sumber sumber pembelajaran IPS.

B. Hubungan Ilmu Sosial dengan IPS

IPS ialah bidang studi yang merupakan paduan (fusi) dari sejumlah mata pelajaran sosial dan IPS juga dikatakan sebagai suatu sarana mata pelajaran yang menggunakan bagian-bagian tertentu dari ilmu-ilmu sosial oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti:

1. Ilmu-ilmu sosial manakah yang dapat dipadukan, dan mempunyai keterkaitan dalam proses pembelajaran
2. Bagaimana cara memadukannya, sebab tidak semua materi ilmu sosial dapat dipadukan
3. Bagian-bagian apa sajakah yang perlu bagi pembelajaran IPS

Secara konseptual hubungan antara IPS dengan ilmu-ilmu sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Disiplin ilmu-ilmu sosial dijadikan kerangka utama berfikir dalam mengembangkan kurikulum.
2. Bahan untuk IPS dikembangkan terlebih dahulu, serta memilih dan memilah disiplin-disiplin ilmu sosial kemudian diidentifikasi konsep-konsep dasar yang perlu diketahui peserta didik. Konsep-konsep dasar ini dipilih dan disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam kurikulum IPS. Konsep dasar yang dipilih dijadikan pokok bahasan dalam kurikulum. Dengan kata lain, ilmu-ilmu sosial secara langsung memberikan bahan pembelajaran untuk kurikulum IPS. Oleh karena itu, topik-topik yang akan diajarkan dalam kurikulum IPS ialah hasil dan inventarisasi konsep dasar dari disiplin ilmu-ilmu sosial. Tidak salah jika dikatakan bahwa IPS ialah gabungan ilmu-ilmu sosial yang diajarkan di sekolah.

Berbicara mengenai konsep dasar menurut James G. Womeck konsep IPS ialah suatu kata atau ungkapan yang berhubungan dengan sesuatu yang menonjol, sifat yang melekat, pemahaman dan

penggunaan konsep yang tepat bergantung pada penguasaan sifat yang melekat tadi, pengertian umum kata yang bersangkutan, konsep memiliki pengertian denotatif dan juga pengertian konotatif.

Struktur merupakan konsep pedagogies dan perlu diajarkan melalui IPS. Agar murid dapat secepatnya menghayati ide-ide atau pokok pikiran dari ilmu yang dimaksud. Dengan mengetahui dan menguasai pengetahuan tentang ilmu-ilmu sosial, bahasan dan topik-topik IPS baik berupa konsep, prinsip, generalisasi, teori maupun fakta-fakta yang bersumber dari masyarakat dapat dibahas lebih mendalam.

C. Ilmu Sosial sebagai Sumber IPS

Mata pelajaran yang dapat dijadikan sumber pada pengajaran IPS yaitu geografi, sejarah, ekonomi, antropologi, politik dan sosiologi. Guru pengajar IPS harus dapat memanfaatkan materi-materi pada pelajaran tadi. Guru harus menaruh perhatian yang penuh kepada apa yang diuraikan dan disajikan pada mata pelajaran yang termasuk ilmu sosial. Jika guru telah menaruh minat yang besar terhadap materi yang diajarkan, maka peserta didik akan menaruh minat yang besar. Oleh sebab itu, buku-buku ilmu sosial harus diminati dan dijadikan sumber pengajaran oleh guru dan murid.

Geografi yang mengungkapkan kesuburan tanah, jenis dan penyebaran tanah jenis mata pencaharian penduduk, jenis dan penyebaran sumber daya, transportasi-komunikasi, iklim dan pengaruhnya terhadap kehidupan, pemukiman, tenaga air, globe, peta dan lain-lain harus menjadi sumber dari materi IPS. Menelaah sesuatu gejala dan masalah sosial dengan tidak dihubungkan dengan aspek serta ruang geografisnya, tidak akan dapat mengungkapkan gejala dan masalah itu lebih jauh. Metode dan pendekatan geografi sangat membantu untuk lebih mengerti gejala dan masalah yang sedang dipelajari.

Sejarah dengan proses sejarah yang mengungkapkan peristiwa-peristiwa kehidupan berdasarkan kurun waktunya merupakan sumber dan materi IPS yang sangat berharga. Melalui materi dan pengungkapan sejarah, kita akan dapat memupuk aspirasi anak didik tentang kesenian, kebudayaan dan kehidupan pada umumnya. Melalui materi sejarah, anak didik akan dapat menghargai jasa tokoh-tokoh yang telah berjuang

untuk membela kebenaran dan hak asasi manusia. Mempelajari dan mengkaji gejala serta masalah kehidupan berdasarkan proses sejarahnya merupakan suatu penelaahan yang dinamis. Melalui penelaahan proses sejarah ini kita tidak hanya dapat mengerti peristiwa-peristiwa kehidupan masa lampau dan masa kini yang sedang kita alami, melainkan kita akan mampu juga memperhitungkan kejadian-kejadian masa yang akan datang. Kita akan mampu melakukan prediksi sesuatu gejala dan masalah kehidupan masa yang akan datang. Jika masalah itu merupakan bahaya yang akan mengancam kehidupan, kita dapat melakukan usaha untuk mencegahnya, atau sekurang-kurangnya melakukan usaha mengurangi bahaya tersebut.

Mata pelajaran ekonomi yang merupakan usaha memenuhi kebutuhan materi dari sumber daya dengan modal yang terbatas, produksi bahan kebutuhan, pengangkutannya, distribusinya dan lain-lain kegiatan usaha saling memenuhi kebutuhan antara berbagai kelompok manusia di antara berbagai daerah menjadi sumber dan materi IPS. Ilmu ekonomi dan mata pelajaran ekonomi mendidik para siswa dapat memanfaatkan sumber daya dan tenaga yang terbatas, untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses produksi dengan distribusinya yang menggunakan berbagai cara menjadi materi yang berharga bagi pengajaran IPS. Perdagangan, pengangguran, kelaparan dan lain-lain ialah peristiwa-peristiwa ekonomi sehari-hari yang dapat dijadikan sumber dan materi pelajaran IPS untuk mengembangkan pengertian anak didik kepada hubungan dasar sistem ekonomi dengan cara hidup manusia yang selanjutnya juga dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk menciptakan kehidupan ekonomi yang wajar bagi dirinya sendiri dan masyarakat.

Antropologi yang mengungkapkan bagaimana kemampuan manusia menciptakan hasil-hasil kebudayaan dengan perkembangannya dari keadaan yang sederhana kepada keadaan yang makin maju, merupakan sumber dan materi yang harus dipelajari pada pengajaran IPS. Bagaimana daya adaptasi manusia di berbagai ruang geografi terhadap keadaan lingkungan setempat yang menghasilkan tingkat-tingkat kebudayaan yang berbeda-beda merupakan materi yang berharga untuk memupuk pengertian para siswa kepada kemampuan budaya manusia yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini dapat

memupuk saling pengertian antar kelompok yang menjadi dasar kerjasama di antara kelompok-kelompok yang bersangkutan. Suasana dan kemampuan ini harus dipupuk dan disajikan pada pengajaran IPS, kita akan dapat membukakan pengertian anak didik seluas-luasnya sehingga mereka tidak akan meremehkan dan merendahkan tradisi dan kebiasaan yang berlaku pada kelompok lain. Bahkan kebalikannya mereka akan mengisolasi dirinya dari masyarakat. Pokoknya, melalui sosiologi sebagai sumber dan materi pengajaran IPS, guru dapat membentuk dan membimbing anak didik menjadi warga negara yang sadar dan penuh dengan tanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap masyarakat.

Demikian beberapa bidang keilmuan yang menjadi sumber bagi pengajaran IPS, masih ada keilmuan yang lain yang juga menjadi sumber yang berharga. Bidang keilmuan itu antara lain psikologi, ilmu hukum, ilmu pendidikan, dan ekologi manusia. Untuk keperluan itu, guru IPS juga harus menaruh minat yang besar untuk mempelajari dan mendalami tiap bidang keilmuan tadi. Dengan melalui usaha ini, ia akan selalu mampu menyajikan materi pelajaran IPS yang segar dan relevan dengan perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Ia tidak akan menjadi guru yang ketinggalan zaman.

D. Masyarakat sebagai Sumber dan Materi IPS

Ilmu Pengetahuan Sosial ialah bidang pengetahuan yang digali dari kehidupan praktis sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS yang melupakan masyarakat sebagai sumber dan objeknya merupakan suatu bidang pengetahuan yang tidak berpijak pada kenyataan. IPS yang tidak bersumber kepada kenyataan tadi, tidak mungkin akan mencapai sasaran dan tujuannya, tidak akan memenuhi tuntutan kemasyarakatan.

Pengajaran IPS tidak hanya sekedar menyajikan materi yang akan memenuhi ingatan para siswa, melainkan lebih jauh, kebutuhannya sendiri dan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, pengajaran IPS harus pula mampu menggali materi-materi yang bersumber kepada masyarakat. Mulai dengan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam kelas di luar jendela kelas, di dalam lingkungan sekolah, di lingkungan tempat tinggal para siswa, dan

kemudian makin luas jangkauannya ke kawasan yang lebih jauh. Gejala dan masalah yang ada pada lingkungan tadi, dijadikan perangsang untuk menarik perhatian para siswam. Materi tadi kita jadikan bahan pembahasan di dalam kelas dalam rangka pelajaran IPS. Tiap hal yang dirasakan sebagai suatu ketimpangan atau kecanggungan, dapat dijadikan bahan untuk dibahas dengan para siswa. Dengan demikian, guru selalu memberikan makna kepada setiap benda, gejala, dan masalah sebagai materi IPS. Sehingga melalui proses semacam itu, baik guru maupun anak didik tidak akan canggung menghadapi kenyataan sebagai bahan yang harus dipikirkan dan harus dibahasnya.

Gejala-gejala yang ada diluar jendela kelas dan di luar halaman sekolah seperti persampahan, kemacetan lalu lintas, kekurangan air bersih, kekurangan gizi, pengangguran dan lain-lain merupakan materi IPS yang dapat merangsang pemikiran siswa. Gejala-gejala yang kita tinjau dari berbagai dimensi (multidimensional) yaitu dari dimensi atau segi ekonomi, dari segi tradisi, dari segi sikap mental, segi pemerintahan dan dari segi hubungan antar manusia, dan lain-lain. Katakanlah gejala atau masalah sampah di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat tinggal akan menyangkut kemampuan ekonomi masyarakat, kebiasaan, pengawasan dari pihak yang berwenang, sikap mental masyarakat, hubungan antar sesama warga masyarakat dan lain-lain. Pendekatan ini tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa dari fakultas Ilmu Sosial, murid-murid Sekolah Dasar pun mampu melakukannya. Para siswa dapat membawa persoalan-persoalan sosial, yang selanjutnya juga dilatih untuk menyusun alternatif pemecahannya.

Melalui proses yang dikemukakan seperti di atas, guru dan siswa telah berhasil memberikan fungsi yang praktis kepada masyarakat sebagai sumber dan materi IPS. Dengan demikian, baik guru maupun murid tidak berhadapan dengan sumber dan materi yang asing bagi mereka. Pada diri mereka dapat terbina konsep-konsep IPS yang sesuai dengan kenyataan.

Pengarahan materi-materi IPS yang bersifat makro dan berbobot, pada tingkat-tingkat pendidikan yang lebih lanjut, dasarnya harus dari konsep-konsep yang sederhana dan yang diambil dari kenyataann yang dekat. Berdasarkan tahap-tahap itu, secara berangsur-angsur ditingkatkan kepada materi dan masalah yang berbobot. Pada tahap

permulaan guru harus menghindarkan apa yang diungkapkan pada peribahasa “semut di seberang lautan terlihat, tetapi gajah di pelupuk mata tidak nampak”.

Selanjutnya, masyarakat itu selain menjadi sumber dan materi IPS, juga menjadi laboratorium. Pengetahuan, konsep, dan teori-teori IPS yang telah diperoleh murid-murid di kelas, selain dapat dicocokkan di masyarakat dapat pula diterapkannya. Masyarakat merupakan tempat yang nyata untuk mencobakan segala pengetahuan IPS yang telah dipelajarinya. Masyarakat menjadi laboratorium yang nyata bagi pengajaran IPS.

Bagi pengajaran IPS, masyarakat merupakan laboratorium yang lengkap dengan segala alat dan media pengajarannya. Oleh karena itu, secara praktis pengajaran IPS tidak perlu memiliki laboratorium yang dibuat secara khusus dengan memakan biaya yang besar. Masyarakat dengan segala gejala dan masalah pengembangan daya pikir anak didik yang sedang mempelajari IPS tanpa menggunakan masyarakat sebagai laboratoriumnya, merupakan proses belajar mengajar yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Merupakan proses belajar mengajar yang menjauhkan anak didik dari kenyataan hidup yang sedang dialaminya.

Secara wajar, pada pelaksanaan pengajaran IPS, kita harus menggunakan masyarakat sebagai sumbernya, materinya dan sebagai laboratorium tempat mencocokkan pengetahuan teoritis dan praktisnya. Pada pengajaran IPS ini, guru harus membawa anak didik kepada kenyataan hidup sebenarnya yang dapat dihayati mereka, Ditanggapinya, dianalisisnya dan pada akhirnya dapat membina kepekaan sikap dan mental keterampilan dalam menghadapi kehidupan yang nyata tadi. Itulah sasaran dan tujuan utama pengajaran IPS.

Melalui pengajaran IPS seperti yang digambarkan di atas, kita dapat mengharapkan terbinanya warga negara yang akan datang yang peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental yang positif terhadap segala ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi segala masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri terutama yang menimpa kehidupan masyarakat.



BAB VII

Paradigma Pembelajaran IPS

Dalam dunia akademis istilah *paradigm* atau *paradigm* di populerkan oleh Thomas Samuel Kuhn (1922-1996), filsuf Amerika yang pemikirannya berpengaruh luar biasa bagi perkembangan ilmu Pengetahuan kontemporer. Gagasan *paradigm* itu di kemukakan melalui buku tipis berjudul *"The Struktur of Scientific Revolutions"* (1962). Cetakan kedua buku ini diterbitkan pada tahun 1970 dengan menambahkan *post-script* yang sangat penting. Buku keduanya adalah *The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change* (Chicago and London: University Of Chicago Press, 1977).

Kuhn mengemukakan bahwa konsep *paradigm* adalah sebagai berikut:

"A Paradigm is a Fundamental image of the subject metter within a science. It serves to define what should be studied, what question should be asked, how they should be asked and what rules should be followed in interpreting the answer obtained. The paradigm is the broadest unif of consensus whitin as ascience and serves to differentiate one scientific community for (or subcommunity) from another. It subsumes,

defines and interrelates the exemplars, theories methods and instrument that exist within it" (Ritzer, 1996, p. 500).

Secara umum Kuhn mengartikan paradigma dengan beberapa contoh praktik ilmiah aktual yang diterima, seperti hukum, teori, aplikasi dan instrument yang diterima bersama sehingga merupakan model yang dijadikan sebagai sumber dan tradisi yang mantap dalam riset-riset ilmiah khusus. Menurut Kuhn paradigam dapat diartikan sebagai pola, model atau skema konseptual.

Menurut buku pengembangan pembelajaran guru di SD oleh Dr. Ahmad Susanto (2014, p. 10) Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu Pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah, Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul *the structure of scientific revolution*. Jadi intisari pengertian paradigma adalah suatu asumsi – asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai), sehingga merupakan suatu sumber hukum - hukum, metode, serta penerapan ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa paradigma pembelajaran IPS adalah model atau kerangka berfikir pengembangan IPS yang diwacanakan dalam kurikulum pada sistem pendidikan Indonesia, dan IPS merupakan studi yang mempelajari tentang masyarakat atau manusia dan merupakan Ilmu Pengetahuan Sosial yang diambil dari Ilmu Sosial. Ada tiga istilah yang termasuk bidang pengetahuan sosial, yaitu: Ilmu Sosial (*Social Science*), Studi Sosial (*Social Studies*), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).

1. Ilmu Sosial (*Social Science*)

Nursid Sumaatmadja, menyatakan bahwa ilmu sosial adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia baik secara perorangan maupun tingkah laku kelompok. Oleh karena itu, ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat.

2. Studi Sosial (*Social Studies*)

Studi Sosial bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin akademis, melainkan lebih merupakan suatu bidang

pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Ahmad Sanusi (1971, p. 18) menyatakan Studi Sosial tidak selalu bertaraf akademis-universitas, bahkan merupakan bahan-bahan pelajaran bagi siswa sejak pendidikan dasar dan dapat berfungsi sebagai pengantar bagi lanjutan kepada disiplin-disiplin ilmu sosial. Studi sosial merupakan suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial yang terjadi pada masyarakat.

3. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Pada dasarnya Mulyono Tj (1980, p. 8) memberi batasan IPS adalah suatu pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary Approach*) dari pelajaran ilmu-ilmu Sosial. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu Sosial, seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya.

Menurut pasal 37 UU RI NO.20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa, mata pelajaran IPS merupakan salah satu bagian dari kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Tujuan utama pendidikan IPS di SD mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun masyarakat. Dari tujuan IPS tersebut agar peserta didik dapat:

1. Memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungannya melalui pemahaman terhadap nilai-nilai sejarah dan kebudayaan masyarakat
2. Mengetahui dan memahami konsep dasar dan mampu menggunakan metode yang diadopsi dari ilmu-ilmu sosial, dan digunakan untuk memecahkan masalah
3. Memperhatikan isu-isu dan masalah sosial dan membuat analisis secara kritis
4. Mengembangkan berbagai potensi untuk membangun diri sendiri agar *survive* di tengah globalis
5. Mampu berkompetisi dan berpartisipasi dalam masyarakat.

IPS sebagai bidang studi memiliki garapan yang dipelajari cukup luas meliputi gejala-gejala dan masalah kehidupan manusia

dimasyarakat. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi.

Tujuan kurikuler yang dimaksud adalah tujuan pendidikan IPS. Secara keseluruhan tujuan pendidikan IPS di SD/MI sebagai berikut:

- a. Membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya kelak dimasyarakat
- b. Membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis dan menyusun alternative pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat
- c. Membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian
- d. Membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif dan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut.
- e. Membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan kehidupan, masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Supardi, dkk (2017, p. 1-16) Adapun implementasi kurikulum 2004 (KBK) merupakan salah satu terobosan untuk membuat pendidikan IPS menjadi lebih bermakna, walaupun hasilnya belum jelas kelihatan kurikulum ini telah dikubur. Keluarnya KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) Secara prinsip sebenarnya ingin membuat pengembangan kurikulum IPS secara integral di pendidikan dasar (SD/MI). Pendidikan IPS di SD sudah mulai tertata sebagai pendidikan IPS integral.

Sedangkan kurikulum IPS tahun 2006 bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut :

- a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan
- b. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial
- c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan

- d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional, dan global.

Dalam kegiatan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, siswa dapat dibawa langsung kedalam lingkungan alam dan masyarakat. Dengan lingkungan alam sekitar, siswa akan akrab dengan kondisi setempat sehingga mengetahui makna serta manfaat mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial secara nyata. Manfaat yang diperoleh setelah mempelajari ilmu pengetahuan sosial disamping mempersiapkan diri untuk terjun kemasyarakat, juga membentuk dirinya sebagai anggota masyarakat yang baik dengan menaati aturan yang berlaku dan turut pula mengembangkannya serta bermanfaat pula dalam mengembangkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi.

Pada ruang lingkup mata pelajaran IPS SD/MI meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Manusia, tempat, dan lingkungan
- b. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan
- c. Sistem sosial dan budaya
- d. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan

Menurut Gorton, dkk (2014, p. 1-15) Pembelajaran IPS akan berhasil dengan baik apabila guru dapat memperhatikan *cultural background* dan *cultural diversity*. Untuk itu, dalam proses pembelajaran mempertimbangkan pengalaman dan latar belakang peserta didik sebagai landasan dasar, untuk memahami setiap permasalahan yang dihadapi. Menurut perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jhean Piaget, siswa SD berada pada tahap operasional konkret. Oleh sebab itu, pembelajaran akan lebih berhasil apabila didasari oleh pengalaman – pengalaman pribadi peserta didik secara factual dan konkret. Peserta didik belajar IPS diawali dari keadaan lingkungan sekitar, menyangkut aspek geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, pemerintahan (politik), dan lain-lain. Dalam membangun suatu konsep dimulai dengan proses asimilasi. Selanjutnya, apabila sudah mantap sudah mantap berlanjut kepada jenjang berikutnya yaitu proses adaptasi.

Proses pembelajaran IPS akan dapat berhasil apabila guru memiliki bekal pengetahuan, formula IPS, dan karakteristik IPS itu

sendiri. Pelajaran IPS merupakan perpaduan dari lima komponen yang terdiri dari: (1) *time*, (2) *space*, (3) *issues*, (4) *concept*, dan (5) *relationship*. Pemahaman guru tentang konsep dan karakteristik pembelajaran IPS merupakan modal penting untuk membimbing belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS. Oleh karena materi IPS di SD cukup luas, sedangkan waktu yang disediakan untuk pelajaran itu hanya 2 jam pelajaran setiap minggunya maka guru juga harus pandai-pandai memilih dan memilah materi pelajaran yang perlu diperhatikan sehingga terpenuhi aspek keluasan dan kedalaman materi.

Dalam hal ini ada 3 paradigma pembelajaran IPS yang menjadi tradisi pembelajaran IPS antara lain:

A. IPS sebagai Transmisi Kewarganegaraan

Menurut Barr, dkk (1978, p. 40-75) istilah *Citizenship Transmission* menunjukkan kepada model mengajar di mana guru-guru ingin agar tingkah laku, pengetahuan, pandangan, dan nilai-nilai tertentu akan dipelajari oleh murid-murid. Tingkah laku, pengetahuan, dan sebagainya, sudah merupakan tradisi dalam kebudayaan, di mana baik guru maupun murid turut berpartisipasi. Guru secara literal telah begitu saja memindahkan pola-pola kebudayaan yang sangat penting itu yang percaya bahwa masyarakat mengharapkan demikian.

Tujuan dan cita-cita tradisi ini sesuai namanya yaitu kewarganegaraan. Tetapi istilah warga negara haruslah diberi batasan yang tepat seperti yang diartikan dalam *citizenship transmision*. Seorang warga negara yang baik itu ialah seseorang yang menyesuaikan diri dengan lingkungan, menganut keyakinan tertentu, loyal pada peraturan-peraturan, berpartisipasi dalam kegiatan tertentu, dan menyesuaikan diri pada norma-norma yang seringkali merupakan karakteristik lokal.

Warga negara yang baik ialah warga negara yang telah melakukan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Secara ringkas guru mengartikan warga negara yang baik ialah orang yang memegang teguh nilai dan sikap, menerima dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

a. Pengertian

Transmisi kewarganegaraan ialah tradisi pembelajaran IPS yang menekankan pada pewarisan nilai-nilai kepada peserta didik agar mereka memiliki pedoman dalam berperilaku dan menjadi warga negara yang baik. Nilai-nilai yang diwariskan terdiri dari:

- 1) Cita-cita universal
- 2) Cita-cita nasional
- 3) Cita-cita regional
- 4) Kebudayaan aneka ragam
- 5) *Personals ideals and values*

b. Tujuan

Agar siswa **menguasai sejumlah nilai-nilai**, dan membentuk kewarganegaraan dengan **membentuk keyakinan** sehingga siswa memiliki **sikap yang benar** dan **partisipasi**. Tujuan lebih rinci yaitu:

- 1) Mengembangkan jiwa patriotisme.
- 2) Memahami dan mengapresiasi nilai-nilai, lembaga-lembaga dan praktek-praktek bangsa Amerika.
- 3) Menginspirasi siswa untuk memiliki integrasi pribadi dan tanggung jawab warga negara.
- 4) Mengerti dan menghargai nenak moyang bangsa Amerika.
- 5) Aktif berdemokrasi.
- 6) Peka terhadap problem sosial.
- 7) Menampilkan cita-cita, sikap dan ketarmpilan serta berhubungan baik dengan orang lain.
- 8) Memahami dan menghargai sistem ekonomi bebas.

c. Isi

Adapun isi atau materi yang diajarkan antara lain:

- 1) Keyakinan, nilai-nilai dan cita-cita yang tepat.
- 2) Sejarah bangsanya.
- 3) Kebudayaan dan keadaan masyarakat.
- 4) Sejarah konstitusi Amerika
- 5) Sistem pemerintahan.

Siswa mempelajari studi sosial yang isinya berbeda dengan kenyataan lingkungan. Misalnya:

- 1) Tokoh patriotik hampir seperti nabi, atau super Abraham Lincoln
- 2) Perang masa lalu membicarakan orang baik dan jahat.
- 3) Materi studi sosial menutupi-nutupi sifat negatif.
- 4) Sikap rasial, kriminologi, kekerasan, kemiskinan, bentrokan kelas, perpecahan keluarga, tidak diperlihatkan dengan jelas..

d. Kompetensi

Adapun kompetensi yang ingin dicapai dengan tradisi ini ialah:

- 1) Siswa menguasai sejumlah nilai-nilai.
- 2) Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan positif.
- 3) Memiliki sikap yang benar.
- 4) Melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang baik seperti: membayar pajak, ikut wajib militer.
- 5) Mematuhi hukum.

e. Metode

Pendekatan yang digunakan ialah indoktrinasi yaitu memiliki anggapan dasar bahwa pengajar memiliki kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai mandiri. Guru lebih mendominasi dalam transfer pengetahuan, sementara peserta didik hanya menerima dan menghafal konsep-konsep yang diajarkan guru. Adapun metode yang digunakan yaitu:

- 1) Transmisi langsung
Guru menjelaskan materi, memberikan informasi penting dengan membawa siswa menyelami masalah kewarganegaraan sehingga siswa mengetahui sejarah dan budaya bangsanya.
- 2) Transmisi tidak langsung
Siswa hanya menemukan dan menginterpretasikan sendiri nilai-nilai yang tepat, dalam hal ini guru mengajarkan siswa berfikir kreatif.
- 3) Transmisi berorientasi pertanyaan
Siswa harus aktif dalam bertanya dan menyelidiki untuk mengetahui informasi secara mendalam.

B. IPS sebagai Ilmu Sosial

Menurut Barr, dkk (1987, p. 78-112) IPS sebagai ilmu sosial bertujuan menciptakan warga negara yang sempurna yang telah menguasai cara berpikir para ahli ilmu sosial. Cara berpikir tersebut berhasil melahirkan ahli-ahli riset yang mengetahui bagaimana menginterpretasikan dan menggunakan pengetahuan sosial yang dapat melihat dan membedakan masalah.

Siswa didorong untuk mendapatkan pola pikir seperti ahli-ahli ilmu sosial. Kemudian, dalam kehidupannya kelak menghadapi problem yang tak terelakkan dalam alam politik demokrasi, mereka akan memakai pola betrpikir tersebut.

1. Latar Belakang Transmisi Kewarganegaraan

Adanya asumsi para ahli bahwa:

- a. Kurikulum studi-studi sosial yang diajarkan merupakan hal yang pandir, terpecah-pecah dan kosong.
- b. Materi seperti sejarah dan pemerintahan seperti kesibukan yang tidak bertujuan.
- c. Hanya sedikit membahas mengenai dinamika masyarakat.
- d. Pada tahun 1929 komisi AS mulai memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah untuk memusatkan pelajaran-pelajaran studi sosial pada hal-hal sebagai berikut:
- e. Pelajaran yang memusatkan perhatian pada minat murid dan masalah di masyarakat.
- f. Murid-murid didorong untuk melakukan penyelidikan seperti yang dilakukan oleh ilmuan sosial seperti: meneliti sumber-sumber primer, analisis interpretasi-interpretasi historis, pembentukan konsep-konsep dasar.
- g. Mengarang sejarah mereka sendiri.
- h. Peserta didik diharuskan mempelajari metode penyelidikan, ketekunan, mengeluarkan kritik, mencari sumber-sumber yang autentik, dan mempelajari penjelasan atau verivikasi.

Awal tahun 1960-an disiplin ilmu sosial telah matang dan mulai menentang pengaruh tradisi para sejarawan pada kurikulum-kurikulum sekolah. Studi-studi sosial ini mulai baru setelah anggaran federal dan bantuan-bantuan dana mulai mengalir.

2. Pengertian IPS diajarkan sebagai Ilmu Sosial

Hakikat IPS diajarkan sebagai ilmu sosial merupakan kelanjutan dari tradisi pembelajaran IPS. Perkembangan zaman semakin kompleks, sehingga masalah yang terjadi di masyarakat semakin kompleks. Oleh karena IPS diajarkan sebagai ilmu sosial dengan harapan siswa tidak hanya mampu menjadi warga negara yang baik, tetapi lebih dari itu. Yaitu peka terhadap masalah yang ada di masyarakat serta belajar untuk memecahkan masalah tersebut.

3. Tujuan

- a. Siswa mampu melihat dunia seperti halnya ahli ilmu sosial. Mulai dari pertanyaan yang diajukan, alat-alat dan konsep analitis.
- b. Siswa memiliki pola pikir dan kebiasaan berpikir yang terkait dengan disiplin ilmu sosial tertentu.
- c. Mampu memahami dinamika masyarakat.
- d. Peka terhadap masalah sosial di masyarakat.
- e. Mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait penyelesaian masalah sosial.
- f. Mampu melakukan penyelidikan terhadap berbagai hal terkait dengan disiplin ilmu sosial tertentu.

4. Karakteristik Kurikulum

- a. Bahan-bahan aktual merupakan sumber primer. Misalnya tentang petani. Maka siswa harus mengumpulkan secara langsung data-data yang berkaitan dengan petani.
- b. Guru meminta murid-murid bekerja seperti halnya ahli sosial. Dalam contoh petani di atas misalnya: murid harus sanggup mengidentifikasi kekuatan-kekuatan kebudayaan yang merupakan ciri khas kehidupan petani.

5. Isi/ Materi

Ahli sosial mengingkan siswa dalam melihat persoalan sebagaimana seorang ahli ilmu sosial yaitu dengan berpikir rasional dan objektif melalui penelitian. Dari penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa ilmu sosial telah terbagi dalam beberapa bidang seperti antropologi, geografi, ekonomi politik dan lain-lain. Maka, kurikulum pembelajaran sosial menyangkut spesifikasi bidang-bidang yang disebutkan di atas misalnya antropologi kurikulum berisikan

modernisasi dan masyarakat tradisional. Isi materi terdiri dari buku teks, dan catatan-catatan perkuliahan guru mengenai ilmu sosial.

Dalam memberikan materi, guru-guru banyak memberikan pelajaran kepada siswa sesuai dengan apa yang mereka dapat sewaktu di kampus. Disebabkan studi-studi sosial mulai terbagi menjadi beberapa disiplin ilmu (sejarah, ekonomi, antropologi, geografi, sosiologi), maka kurikulum pembelajaran juga dispesifikasikan sesuai masing-masing disiplin ilmu. Materi yang diajarkan seperti:

- a. Memanfaatkan materi ilmu sosial yang telah diperoleh guru sewaktu kuliah atau mengikuti kursus-kursus ilmu sosial. (sebelum tahun 1960-an)
 - b. Mengambil masalah yang membingungkan dalam gejala sosial.
 - c. Materi ilmu sosial dikembangkan oleh ahli sosial professional.
 - d. Terdiri dari bermacam-macam studi kasus yang menarik, gambar-gambar, data-data mentah.
 - e. Isinya mencerminkan problem dan kepentingan praktisi ahli-ahli sosial dengan sangat cermat.
 - f. Tidak bersifat deskriptif.
 - g. Memsaukkan sejumlah besar sumber utama materi dari sosial *scientists*.
 - h. Guru meminta murid-murid untuk memecahkan persoalan yang disuguhkan ahli-ahli islm sosial dengan memakai kategori dan proses yang dilakukan oleh sarjana-sarjana sosial.
6. Kompetensi
- Kompetensi yang ingin dicapai dengan tradisi ini ialah:
- a. Memiliki kemampuan berfikir secara multi perspektif/ multi disiplin.
 - b. Memiliki kemampuan berfikir seperti ahli-ahli ilmu sosial.
 - c. Mampu memecahkan persoalan dengan memakai kategori dan proses ahli-ahli sosial.
7. Metode

Pendekatan ekspositori yaitu catatan sekolahnya dibaurkan dengan silabus sekolah (sebelum tahun 1960-an). Metode yang digunakan ialah penyelidikan. Adapun peran guru dan siswa ialah:

- a. Peran guru: sebagai fasilitator yang menyediakan materi yang menarik untuk dibahas, materi tersebut masih memerlukan data, fakta, dan lain-lain, untuk menyempurnakan informasi yang ada.
- b. Peran murid: sebagai ahli ilmu sosial kecil yang melakukan penyelidikan terhadap materi yang diberikan guru yang masih membutuhkan jawaban sesuai fakta dan data yang ada.

Dengan demikian, hal-hal yang dilakukan siswa dalam metode ini ialah:

- a. Mempelajari cara menarik hipotesis dan memformulasikan hipotesis.
- b. Mempelajari pengumpulan data.
- c. Mempelajari prosedur testing dan mengajukan aneka ragam pertanyaan tentang data.
- d. Menarik kesimpulan dan bukti-bukti dengan meneliti proses-proses logis.

C. IPS sebagai Reflektif Inquiry

Menurut Barr, dkk (1987, p. 116-164) ada 3 fenomena yang melatarbelakangi reflektif inquiry diperlukan yaitu "*perubahan sosial yang cepat, kelompok yang bertentangan, dan ledakan ilmu pengetahuan*". Ketiga hal tersebut menyebabkan krisis pendidikan dalam mengembangkan kurikulum terutama kurikulum sosial studies karena pengajaran dibatasi pada *citizenship transmission* dan *social studies*.

Selama 15 tahun terakhir saat tradisi ini tumbuh hanya beberapa disertasi dan buku yang mengembangkan konsep tersebut berdasarkan filsafat dan psikologis ide. Tradisi ini berharap mampu mengembangkan program studi sosial yang responsif terhadap problem dan isu dalam zaman modern. John Dewey diberi tugas mengembangkan aspek kunci dari reflektif inquiry. Ia mengemukakan bahwa kurikulum sekolah harus berpegang kepada kebutuhan dan minat siswa, tidak perlu berusaha untuk memindahkan segudang pengetahuan yang tidak perlu dan tidak relevan. Oleh karena itu, ia mengembangkan cara berfikir yang lebih efektif dan kecakapan mengambil keputusan.

Pada tahun 1916 para dewan mengembangkan konsep yang revolusioner tentang studi-studi sosial, seperti:

- a. Studi-studi sosial harus didasarkan pada minat dan kebutuhan siswa.
- b. Interpretasi sejarah sekolah-sekolah umum tidak terhambat batasan kronologis dan geografis.
- c. Guru tidak hanya memindahkan isi, tetapi harus membantu siswa mengidentifikasi dan menyelidiki problem.
- d. Problem tersebut harus merupakan kebutuhan mendesak murid atau hal yang vital bagi masyarakat.

Pada tahun 1920 sekolah-sekolah telah mengadopsi pola kurikuler tahun 1916 yang diusulkan oleh dewan, tetapi gagal melaksanakan rekomendasi metode mengajarnya. Hingga pada tahun 1929 ahli sosial dan pendidik menciptakan komisi pada studi-studi sosial. Laporan yang berhasil dihimpun oleh komisi meliputi 17 jilid tentang analisis komprehensif. Komisi sangat setuju dengan pengetahuan ilmu sosial, pentingnya pengajaran *inquiry skills* dan menekankan problem kontemporer.

Pada pertengahan tahun 1950-an reflektif inquiry berkembang sebagai metode mengajar yang praktis. Pada tahun 1960-an pasangan pendidik studi sosial mengembangkan model lain untuk studi-studi sosial sebagai *reflective inquiry*. Donald dan jems misalnya menamakannya metode "*jurisprudensial*".

a. Pengertian

Inquiry merupakan tradisi pembelajaran IPS yang mengajak guru dan murid untuk bekerjasama mengidentifikasi satu masalah yang cocok untuk mereka dan masyarakat. Masalah yang dipilih sesuai dengan minat siswa, memiliki fakta dan nilai-nilai yang relevan karena akan diuji dalam kriteria tertentu. Ada tiga hal yang ditekankan pada defenisi di atas yaitu:

- 1) Berkaitan dengan perasaan jelas dan memahami masalah yang dihadapi para murid.
- 2) Masalah yang ada dikaitkan dengan konteks sosial yang lebih luas.
- 3) Data yang diterapkan relevan menurut kriteria tertentu.

Tradisi ini menginginkan siswa mampu berpikir dan terlibat dalam penelitian, siswa dia arahkan untuk mencari informasi sendiri dan menggunakannya siswa diharapkan mengaplikasikannya dalam

tindakan mereka sehingga mereka dapat memutuskan tindakan yang akan diambil dengan konsekuensinya.

b. Tujuan

- 1) Mengajarkan kepada para siswa menjadi warga negara yang mampu membuat keputusan.
- 2) Agar murid mampu mengidentifikasi masalah dan meresponnya serasional mungkin.
- 3) Membantu para siswa untuk berfikir secara kritis tentang isu yang terjadi.

c. Isi

Materi yang diajarkan ialah

- 1) problem-problem yang dirasakan oleh personal. Karena masalah yang berasal dari individu juga dapat meluas menjadi masalah sosial. Masalah tersebut misalnya disharmoni atau konflik.
- 2) Problem sosial.
- 3) Materi yang dipilih guru berdasarkan minat dan kebutuhan siswa.
- 4) Isyu yang sedang hangat dibicarakan.

d. Kompetensi

- 1) Membentuk warga negara yang mampu membuat keputusan yang rasional, penuh pertimbangan dan berfikir secara matang sehingga berfungsi dalam alam politik demokrasi.
- 2) Mempertajam kemahiran siswa dalam "*decision making*" (membuat keputusan).
- 3) Meningkatkan daya berfikir.
- 4) Mempertajam kemahiran siswa dalam memecahkan masalah.

e. Metode

Metode reflektif inquiry ialah pemecahan masalah. Guru harus memilih satu isu yang diidentifikasi siswa sebagai satu problem.

Adapun prosesnya yaitu:

- 1) Experience (Pengalaman)
Pengalaman diperoleh dari setiap interaksi individu dengan lingkungannya. Seorang individu bias saja bertindak laku dengan cara yang tidak diharapkan.
- 2) Kebimbangan dan ketidaktentuan

Setelah itu guru menimbulkan perasaan bimbang dan ketidakteraturan, membangun motivasi sehingga murid mulai berfikir.

3) Framing The Problem (Membuat Kerangka Masalah)

Selanjutnya siswa mulai membuat kerangka dan batasan masalah. Sehingga siswa memiliki konsep yang jelas.

4) Memformulasikan Hipotesis

Siswa merumuskan hipotesis sementara atau jawaban sementara.

5) Exploring and Evidencing (mencari dan membuktikan)

Selanjutnya siswa mengumpulkan data yang berkaitan dan mengevaluasi sumber-sumber data. Sehingga dapat digunakan untuk menguji hipotesis orisinal.

6) Generalization

Terakhir, siswa membuat pernyataan yakni menjelaskan seberapa jauh hipotesis yang ada dapat memecahkan problem.

f. Inti Proses Reflektif Inquiry

Inti dari proses inquiry ialah diskusi kelas. Guru telah membuat rencana terlebih dahulu agar murid dapat berfikir dengan harmonis dan konsisten dengan bukti yang ada. Beberapa bagian dari diskusi bertujuan untuk mencari beberapa fakta.

g. Unit Terpenting Dari Reflektif Inquiry

Bagian terpenting dari reflektif inquiry ialah penilaian. Tujuan evaluasi tersebut ialah memperluas pemahaman siswa dan sebagai alat umpan balik. Penilaian tidak hanya sekedar memberikan tes objektif atau uraian. Akan tetapi guru harus memperhatikan seluruh proses.

D. IPS sebagai Transformasi Sosial

1. Pengertian Transformasi Sosial

Transformasi sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat baik dalam bentuk sifat, watak, dan struktur.

2. Latar belakang

Ada banyak sekali masalah sosial yang terjadi sebagai akibat dari perubahan sosial seperti: Siswa yang telah belajar IPS ternyata belum mampu menyelesaikan masalah tersebut di masyarakat. maka, masalah-masalah yang ada di masyarakat di bawa oleh guru ke dalam kelas,

untuk didiskusikan bersama siswa dengan tujuan mendapatkan solusi yang bisa disumbangkan untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada.

3. Pengertian

Hakikat IPS sebagai transformasi sosial ialah sebuah tradisi pembelajaran IPS yang mendorong siswa untuk membawa perubahan sosial di masyarakat.

4. Tujuan

- a) Siswa mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.
- b) Siswa mampu memberikan solusi kepada masyarakat tentang masalah sosial yang ada.
- c) Siswa menjadi agen perubahan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih baik.
- d) Melibatkan siswa dalam pekerjaan aksi sosial yang ada.
- e) Siswa mampu mempertahankan kebudayaan dan nilai-nilai yang baik dari bangsanya.

5. Isi/ Materi

- 1) Menganalisis masalah-masalah dan isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan menghasilkan sebuah solusi untuk permasalahan yang ada.
- 2) Siswa diajak untuk melihat dunia secara global, dan harus memahami pengetahuan dan informasi secara global pula.

6. Kompetensi

- 1) Siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat.
- 2) Kembali ke masyarakat dan menjadi agen perubahan sosial.
- 3) Siswa mampu menciptakan perubahan yang lebih baik di masyarakat,
- 4) Siswa memiliki pengetahuan secara global.

7. Metode

Peran guru yaitu membingbing siswa dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan peran siswa yaitu sebagai agen perubahan sosial yang harus mampu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Metode pembelajaran yang digunakan antara lain: